

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

# LAKIP 2022

NGEDO MELUN DO

BPMP KALTARA



## **BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (BPMP) PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 RT 13 RW 5, Tanjung Selor, Bulungan 77212

Telepon (0552) 2034391 Laman <http://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>

Posel [bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id](mailto:bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id)

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara tahun 2022. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara pada tahun 2022.

Tanjung Selor, 23 Januari 2023

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara



Dr. Jarwoko, M.Pd

NIP 197003191997031001

# DAFTAR ISI

---

**i** **HALAMAN SAMPUL**  
Lakin BPMP Kaltara 2022

---

**ii** **KATA PENGANTAR**  
Oleh Dr. Jarwoko, M.Pd

---

**iii** **DAFTAR ISI**  
Lakin BPMP Kaltara 2022

---

**iv** **IKHTISAR EKSEKUTIF**  
Lakin BPMP Kaltara 2022

---

**1** **BAB I PENDAHULUAN**  
Gambaran Umum | Dasar Hukum | Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | Isu-isu Strategis dan Pemasalahan

---

**8** **BAB II PERENCANAAN KINERJA**  
Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara | Tujuan Strategis

---

**13** **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**  
Capaian Kinerja | Realisasi Anggaran

---

**64** **BAB IV PENUTUP**  
Kesimpulan

---

# IKHTISAR EKSEKUTIF



**Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Terbaik 1 atas Nilai Kinerja Keuangan pada Kategori UPT dengan raihan Skor 99,67 Tahun 2019**



**Piagam Penghargaan dari Sekjen Kemdikbud sebagai UPT dengan ULT Daerah dengan Predikat Cukup Tahun 2020**



**Piagam Penghargaan dari Disdikbud Kab. Bulungan kepada Kepala BPMP Prov. Kaltara Dr. Jarwoko M.Pd. atas kerjasamanya dalam bidang pendidikan Tahun 2020**



**Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Selor sebagai Peraih Nilai IKPA terbaik Tahun 2020**



**Piagam Penghargaan dari INOVASI atas kerjasama dalam peningkatan pendidikan Tahun 2020**

Laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Uraian tingkat ketercapaian indikator lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	4.01	<b>409.18%</b>
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	<b>400%</b>
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A (81.72%)	BB (76.80%)	<b>BB</b> <b>93.98%</b>
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83	94.1	<b>113.37%</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>246.99%</b>

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh capaian IKK BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 berada diatas 100%, kecuali persentase capaian Sakip yang belum mencapai target, hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya perlunya kesiapan kompetensi SDM menghadapi tata cara evaluasi Sakip terbaru berdasarkan Permenpan RB No. 88 tahun 2021.

Sedangkan dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap **Rp 19.524.397.410,-** dari total **Rp 19.663.604.000,-** dengan persentase **99,29%**.

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.604.582.000	0	2.601.877.187	99,90	2.601.877.187	99,90
2	BELANJA BARANG	7.166.443.000	0	7.164.601.781	99,97	7.164.601.781	99,97
3	BELANJA MODAL	9.892.579.000	0	9.757.918.442	98,64	9.757.918.442	98,64
	<b>TOTAL</b>	<b>19.663.604.000</b>	<b>0</b>	<b>19.524.397.410</b>	<b>99,29</b>	<b>19.524.397.410</b>	<b>99,29</b>

**A. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:**

1. BPMP Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan;
2. Implementasi Kurikulum Merdeka belum diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan;
3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh satuan pendidikan pelaksana IKM belum optimal di wilayah remote area;
4. Rapor Pendidikan belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan berbasis data; dan
5. Belum maksimalnya pencapaian nilai Literasi dan Numerasi berdasarkan Profil Pendidikan.

**B. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:**

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan;
2. Memberikan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan pelaksana IKM di daerah remote area untuk mengoptimalkan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
4. Membangun koordinasi kepada pemangku kepentingan dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan; dan
5. Melakukan advokasi dan pendampingan ke pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Literasi dan Numerasi peserta didik.

BAB I

# PENDAHULUAN



## A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pertama kali dibentuk pada tanggal 29 Maret 2022 sesuai dengan tanggal diundangkannya peratutran tersebut. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Dr. Jarwoko, M.Pd. dengan jumlah SDM sebanyak 48 pegawai yang terdiri dari 20 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 28 orang pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). Wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara melingkupi seluruh wilayah provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari 4 kabupaten yakni Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan dan 1 kota yakni Tarakan.



Gambar : Peta wilayah kerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara

BPMP Provinsi Kalimantan Utara samapai saat ini masih bertempat di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212.



*Gambar: Kantor Sementara BPMP Provinsi Kalimantan Utara*

Namun pada tahun 2022 ini BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah membangun gedung kantor utama yang bertempat di Jl. Poros Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor, namun masih dalam proses penyempurnaan pada tahun 2023 sehingga direncanakan akan dimanfaatkan pada tahun 2024.



*Gambar : Gedung baru BPMP Provinsi Kalimantan Utara*

Adapun sejarah singkat sebelum terbentuknya BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (BPMP Prov. Kaltara) didirikan atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disetujui pendiriannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi di tanggal 15 November 2016

dan ditetapkan dalam Peraturan Perundangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 13 Februari 2017 dan termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2016-2019 Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tanjung Selor dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP).

2. Pada Agustus 2017 BPMP Kalimantan Utara (Kaltara) pertama kali dibentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017. Meskipun BPMP Kaltara belum memiliki gedung kantor sendiri, tapi BPMP Kaltara telah resmi beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2017 dan akan segera berkantor di Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Kalimantan Utara termasuk dalam kategori Eselon III dengan satu sub bagian umum dan dua seksi, yaitu:
  - Kepala instansi;
  - Sub Bagian Umum;
  - Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu; dan
  - Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pada September 2017 awal pendiriannya selama 3 bulan pertama BPMP Provinsi Kalimantan Utara beroperasi di Jalan Sengkawit Pasar Induk Gedung II dengan Peta kepegawaian per Agustus 2017 BPMP Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 PNS/ASN yaitu Kepala, Kepala Sub bagian Umum dan 2 Orang Kepala seksi, dan dibantu oleh 4 Non PNS (tenaga Honorer) yaitu Satpam dan 3 orang staf administrasi. Untuk operasional keuangan sendiri BPMP Kalimantan Utara masih berinduk pada BPMP Kalimantan Timur.

3. Pada Januari 2018 BPMP Kalimantan Utara merekrut 25 orang Tenaga Honorer yang terdiri dari 5 Tenaga Keamanan dan 2 Tenaga Kebersihan serta 18 orang tenaga administrasi yang diterima secara bertahap. Pada bulan April 2018 BPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke Jalan Mangga II No 065 Rt 090, Tanjung Selor, Sulungan 77212 dengan jumlah pegawai per April 2018 jumlah pegawai BPMP sebanyak 10 orang PNS dan 25 Non PNS.
4. Pada Tahun 2019 Pada saat itu dilakukan rekrutmen Non PNS sejumlah 30 orang dengan rincian 5 Satuan Keamanan, 2 Tenaga Kebersihan dan 28 tenaga Administrasi. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pegawaidi BPMP Kalimantan Utara, maka pada bulan Februari 2019 BPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke gedung yang lebih luas di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212. Pada bulan Mei 2019 terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 7 orang CPNS hasil rekrutmen PNS 2018 yang mulai bekerja di BPMP Kalimantan Utara. Dan diakhir

Agustus 2019 total pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara sejumlah 47 orang dengan 17 orang PNS dan 30 orang PPNPN dengan 1 orang PNS Perbantuan.

5. Pada Tahun 2020 Kemendikbud menerbitkan peraturan terkait OTK terbaru yaitu Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi perubahan struktur organisasi di BPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:
  - Kepala instansi;
  - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan OTK tersebut, BPMP Kalimantan Utara telah melaksanakan 2 kali upacara pelantikan yaitu pada tanggal 22 Juli 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan 3 Pejabat Struktural ke Jabatan Fungsional secara daring dan pada tanggal 13 Agustus 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbud (Kepala dan Kasubbag Tata Usaha) secara daring. Hingga Agustus 2020, jumlah pegawai di BPMP Kalimantan Utara sebanyak 46 pegawai yang terdiri atas 18 orang PNS dan 28 orang PPNPN.

6. Pada Tahun 2021 struktur organisasi di BPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:
  - Kepala instansi;
  - Subbagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sampai akhir tahun 2021 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bertempat di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212 dengan pegawai berjumlah 20 orang PNS, 1 Orang PNS perbantuan, dan 29 orang PPNPN.

## **B.** Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;

6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

## C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi  
 Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara mempunyai tugas yakni *“Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi Kalimantan Utara”*.  
 Adapun fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara Mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
  - b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
  - c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
  - e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
  - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
  - g. Pelaksanaan urusan administrasi.
2. Struktur Organisasi  
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu

Pendidikan, maka struktur organisasi BPMP Kalimantan Utara tahun 2020-2024 dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar : Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

### 3. Isu strategis dan Peran Strategis

#### a. Isu strategis

- 1) Implementasi Kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan optimalisasi PMM, Komunitas Belajar, dan Penerapan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila);
- 2) Kompetensi Literasi dan Numerasi di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Profil Pendidikan belum optimal;
- 3) Peran Pemerintah Daerah terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data;

#### b. Peran Strategis

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon III, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam tata Kelola kelembagaan. Peran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:

- 1) Mitra penting bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam membantu Implementasi Kurikulum Merdeka, pelaksana Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan peningkatan kompetensi Literasi Numerasi;
- 2) Mitra penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya; dan
- 3) Mengawal pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan sukses.

BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



## A. Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Visi BPMP Provinsi Kalimantan Utara merupakan penerapan dari visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu: “*Terbentuknya layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dengan berlandaskan gotong royong*” yang dimaknai bahwa penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan menghasilkan generasi yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang bersaing dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan berlandaskan gotong royong yang berarti penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pendidikan tidak hanya mutlak tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab seluruh perangkat masyarakat.

Adapun Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara yaitu:

1. Meningkatkan pelaku penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah yang berstandar moral dan berkinerja tinggi;
2. Meningkatkan akses penjaminan mutu pendidikan yang melas, merata dan berkeadilan;
3. Meningkatkan layanan penjaminan mutu pendidikan untuk menuju pendidikan dasar dan menengah yang bermutu; dan
4. Meningkatkan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

## B. Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun yang dituangkan kedalam Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024, namun pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap IKK BPMP Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Atas dasar peraturan tersebut, maka dilakukan revisi Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 dan menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan targetnya sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	30	35
SK2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara				
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL	Nilai	83	84	85

## C. Tujuan Strategis

BPMP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) tujuan strategis mengacu pada tujuan strategis pada renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024, yaitu:

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1	Peningkatan mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35
2	Peningkatan tata kelola serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.	Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan strategis, BPMP Provinsi Kalimantan Utara merancang perjanjian kinerja kelembagaan yang diusulkan pada tahun 2022,

sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

### 1. Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.455.030.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.778.672.000
TOTAL			Rp. 19.233.702.000

### 2. Perjanjian Kinerja Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0,98
		[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.840.156.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.823.448.000
TOTAL			Rp. 19.663.604.000

## D. Program Prioritas

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan mendukung kinerja unit utama di bidang pendidikan, BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebuah program prioritas dan merupakan salah satu program prioritas nasional yang alokasi anggarannya diutamakan untuk membiayai program prioritas. Program prioritas BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 adalah Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan alokasi anggaran yang diuraikan berikut ini:

Kode	Uraian	Satuan	Target	Alokasi
03.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Lembaga	42	3.840.156.000
6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Lembaga	42	3.840.156.000
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	42	3.840.156.000
6397.QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	42	3.840.156.000
063	Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP	Kegiatan	46	3.643.668.000
084	Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	Kegiatan	6	196.488.000

BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA



## A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	4.01	<b>409.18%</b>
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	<b>400%</b>
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A (81.72%)	BB (76.80%)	<b>BB</b> <b>93,98%</b>
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83	94.1	<b>113.37%</b>
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>246,99%</b>

### 1. Sasaran Kegiatan 1 (satu)

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan sasaran kegiatan prioritas yang telah diperjanjikan oleh kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan unit eselon 1 (satu), sasaran kegiatan ini adalah sasaran kegiatan yang baru untuk satuan kerja BB/BPMP yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:



## a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

**Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.**

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kondisi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen nasional. Indikator kinerja kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Dikarenakan rapor pendidikan tahun 2022 belum terbit sampai dengan Januari 2023, maka untuk indikator 1.1 tentang persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya ini dihitung berdasarkan data akreditasi 2021-2022 yang bersumber dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP. Adapun metode perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IKK \ 1.1. (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{\text{total sekolah TA 2022}} - \frac{(0,5 \times A_{21}) + (0,35 \times B_{21}) + (0,15 \times C_{21})}{\text{total sekolah TA 2021}}$$

Keterangan :

$\Delta$  : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi

$A_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022

$B_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022

$C_{22}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022

$A_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021

$B_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021

$C_{21}$  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021

Adapun pembobotan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Akreditasi A : 0,5

Akreditasi B : 0,35

Akreditasi C : 0.15

Dengan menggunakan metode perhitungan diatas yang sumber datanya diambil dari hasil Akreditasi 2021-2022 maka diperoleh nilai capaian kinerja untuk IKK 1.1 sebagai berikut:



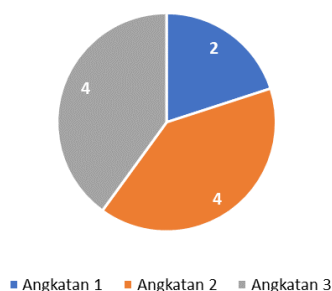
Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.1. terkait persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.1. tahun 2022 adalah sebesar 0,98% satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dan capaiannya adalah sebesar 4,01%, hal ini menggambarkan bahwa capaian IKK 1.1 ini tercapai sebesar 409,18% jauh diatas target yang telah ditetapkan walaupun dalam perhitungan IKK ini menggunakan nilai Akreditasi.

Dikarenakan pada tahun 2022 terdapat revisi Renstra Kemendikbudristek berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, yang berakibat berubahnya IKK yang tertuang dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja BPMP maka IKK terkait persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya ini baru diintervensi oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2022, oleh karena itu **belum dapat disajikan data perbandingan capaian tahun sebelumnya.**

## Capaian PSP (Program Sekolah Penggerak) Jenjang PAUD

Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Akselerasi transformasi sekolah dilakukan di seluruh kondisi sekolah baik negeri maupun swasta, agar bisa bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Berikut data capaian sekolah penggerak di provinsi Kalimantan Utara.

Jumlah Sekolah Penggerak Jenjang PAUD Per Angkatan



Jumlah Sekolah Penggerak Jenjang PAUD Per Kab/Kota



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan sekolah penggerak jenjang PAUD di provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 sebanyak 10 sekolah yang tersebar di beberapa wilayah diantaranya 3 sekolah dari kabupaten Tana Tidung, 3 sekolah dari Nunukan, 1 sekolah dari Tarakan, dan 3 sekolah dari Bulungan. Sedangkan berdasarkan angkatan terdapat 2 sekolah angkatan 1, 4 sekolah angkatan 2, dan 4 sekolah angkatan 4.

Sekolah penggerak yang telah lulus dalam seleksi khususnya untuk angkatan 1 dan 2, diberi *treatment* khusus yakni dengan difasilitasi seorang fasilitator pendamping yang biasa disebut FSP (fasilitator sekolah penggerak). Setelah melalui proses pendampingan secara intens dan dilakukan PMO secara periodik, maka sekolah penggerak ini dibagi lagi berdasarkan tingkat kemampuan untuk beradaptasi dengan program-program dalam sekolah penggerak khususnya implementasi kurikulum merdeka. Sekolah penggerak dibagi menjadi 3 kategori pendampingan sebagai berikut:

1. Intensif : pendampingan oleh FSP dilakukan rutin dan PMO sekolah dilaksanakan setiap satu bulan sekali;
2. Menengah : pendampingan oleh FSP dan PMO sekolah dilakukan setiap 2 bulan sekali; dan

3. Mandiri : pendampingan oleh FSP dan PMO sekolah setiap 3 bulan sekali.

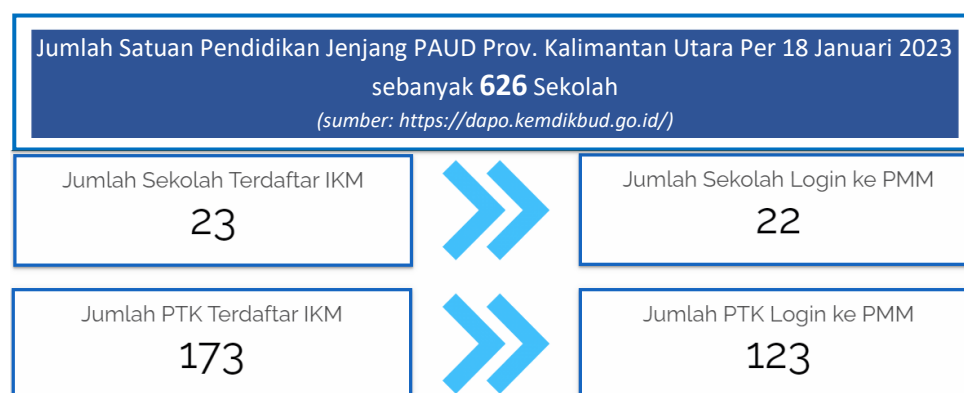
Berikut data sekolah penggerak jika dilihat berdasarkan metode pendampingan:

Jumlah Sekolah Penggerak Berdasarkan Metode Pendampingan



Data diatas menunjukkan bahwa untuk sekolah penggerak jenjang PAUD angkatan 1 da 2, terdapat 4 sekolah yang mendapat pendampingan Menengah dan 2 sekolah secara Intensif sedangkan yang Mandiri belum ada untuk jenjang PAUD.

### Capaian IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) Jenjang PAUD Dikmas




Pada data di atas dapat dilihat bahwa dari 626 sekolah jenjang PAUD yang telah melaksanakan IKM secara mandiri di Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 23 sekolah, dari 23 sekolah tersebut 22 diantaranya telah melakukan login PMM. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah PTK dari 23 sekolah tersebut adalah sebanyak 173 PTK dan 123

diantaranya telah melakukan login PMM (Platform Merdeka Mengajar). Adapun jumlah sekolah berdasarkan tipe sekolah IKM adalah sebagai berikut:

Adoption Rate Sekolah Berdasarkan Tipe Sekolah IKM			
Tipe Sekolah ^	Jumlah Sekolah Terdaftar	Jumlah Sekolah Login ke PMM	Adoption Rate
1. Pilihan 1 : Mandiri Belajar	8	8	100%
2. Pilihan 2 : Mandiri Berubah	3	3	100%
3. Pilihan 3 : Mandiri Berbagi	2	1	50%
4. SP	10	10	100%
<b>Grand total</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>95.65%</b>

(Sumber : Dasbor Implementasi Kurikulum Merdeka Per 20 Januari 2023)

Sedangkan jika ditinjau dari segi wilayah kab/kota adalah sebagai berikut:

Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Terdaftar v	Jumlah Sekolah Login ke PMM	Adoption Rate
1. Kab. Bulungan	7	6	85.71% 
2. Kota Tarakan	6	6	100% 
3. Kab. Tana Tidung	4	4	100% 
4. Kab. Nunukan	4	4	100% 
5. Kab. Malinau	2	2	100% 

(Sumber : Dasbor Implementasi Kurikulum Merdeka Per 20 Januari 2023)

dari data diatas terlihat bahwa dari semua wilayah yang ada di Prov. Kalimantan Utara hanya kab. Bulungan yang capaian login PMM-nya belum 100%.

Dari semua PTK yang telah login PMM dapat dirincikan lagi tingkat pemanfaatan PMM sebagai berikut:

Tipe Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Guru Menonton Video	Jumlah Guru Mengerjakan Quiz	Jumlah Guru Submit Refleksi	Jumlah Guru Memulai Posttest	Jumlah Guru Lulus Posttest	Jumlah Guru Submit Aksi Nyata
Pilihan 1 : Mandiri Belajar	66	38	38	37	32	31	17
Pilihan 2 : Mandiri Berubah	31	13	13	13	13	12	1
Pilihan 3 : Mandiri Berbagi	3	2	2	2	2	2	2
<b>Grand Total</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>20</b>

(Sumber : Dasbor Implementasi Kurikulum Merdeka Per 20 Januari 2023)

### Capaian Aktivasi Akun Belajar.id Jenjang PAUD Dikmas

Jumlah Akun Terdaftar di Dapodik	Total Akun Tersedia	Jumlah Akun Sudah Mengaktifasi	% Aktivasi Akun belajar.id
28,212	23,343	3,139	13.45%

(Sumber : Dasbor Aktivasi Akun Belajar Per 23 Januari 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa akun yang tersedia di Dapodik untuk jenjang PAUD sebanyak 28.212 akun namun yang tersedia adalah sebanyak 23.343 akun. Dari total akun yang tersedia tersebut 13,45% diantaranya telah melakukan aktivasi. Adapun aktivasi akun belajar jika dipantau dari masing-masing kab/kota jenjang PAUD adalah sebagai berikut:

	Kota / Kabupaten	Akun Tersedia ② ▾	% Aktivasi ① ▾
1.	Kab. Tana Tidung	1,697	52.92%
2.	Kota Tarakan	5,211	13.8%
3.	Kab. Nunukan	7,509	11%
4.	Kab. Malinau	3,613	9.83%
5.	Kab. Bulungan	5,313	6.42%

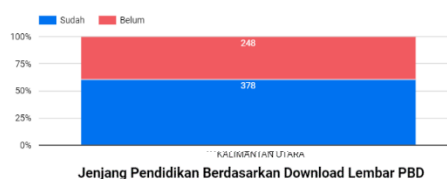
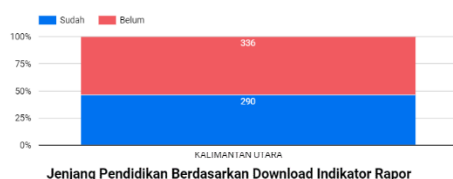
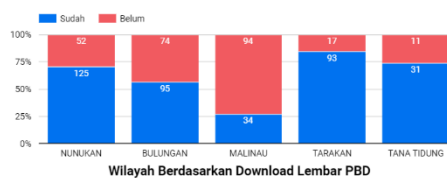
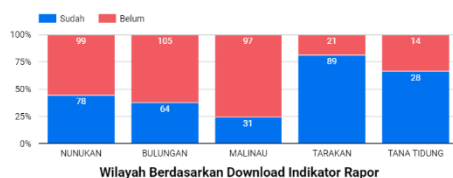
(Sumber : Dasbor Aktivasi Akun Belajar Per 23 Januari 2023)

## Capaian PBD (Perencanaan Berbasis Data) Jenjang PAUD

Total Sekolah <b>626</b>	Sudah Login <b>386</b>	Download Indikator <b>290</b>	Download Lembar PBD <b>378</b>
	Belum Login <b>240</b>	Belum Indikator <b>336</b>	Belum Lembar PBD <b>248</b>

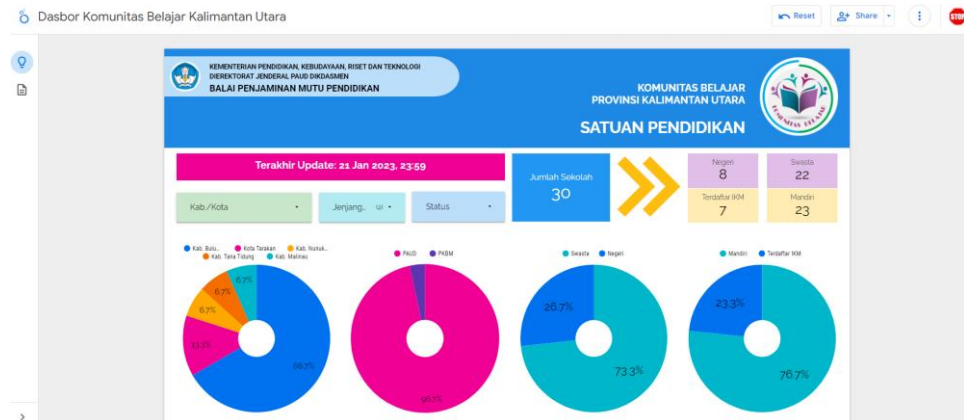
(Sumber: <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/monev-akses-rapor-pendidikan/> Per 23 Januari 2023)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dari total 626 satuan pendidikan jenjang PAUD sebanyak 386 sekolah telah melakukan akses/login Rapor Pendidikan, 290 sekolah telah mendownload indikator, dan 378 sekolah telah melakukan download lembar PBD. Maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 248 sekolah belum mengakses Rapor Pendidikan.



## Program Inovasi

### Dasbor Komunitas Belajar Kalimantan Utara Jenjang PAUD Dikmas



BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan sebuah media informasi untuk mempermudah memantau aktivitas komunitas belajar di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi Kurikulum Merdeka. Komunitas Belajar yang terdaftar adalah komunitas belajar dari sekolah IKM maupun sekolah yang mendaftar secara mandiri. Aktivitas yang dapat dipantau melalui dashboard ini adalah diantaranya:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas belajar di satuan pendidikan;
2. Jenis pembahasan saat kegiatan;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan komunitas; dan
4. Durasi yang dilaksanakan saat kegiatan.



Gambar diatas menunjukkan fasilitas yang disediakan oleh komunitas belajar pada satuan pendidikan. Dengan advokasi yang terus dilakukan diharapkan satuan pendidikan dapat membentuk komunitas belajar kemudian mendaftarkan komunitas belajarnya ke BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui link <https://s.id/komunitas-belajar-kaltara>, setelah mendaftar komunitas belajar didorong untuk melakukan pengisian kegiatan mingguan. Komunitas belajar juga dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau meminta pendampingan jika mereka membutuhkan melalui menu **Butuh Bantuan**.

Berikut ini disajikan informasi terkait capaian Komunitas Belajar Jenjang PAUD Dikmas:



(Sumber: <https://datastudio.google.com/u/0/reporting/47b09708-9e66-4026-b4bb-0566cd3583db/page/Zhb7C> Per 21 Januari 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 30 sekolah yang terdaftar dan dapat dipantau aktivitas komunitas belajarnya, 8 diantaranya adalah sekolah negeri, 22 sekolah swasta, 7 sekolah merupakan sekolah IKM, dan 23 sekolah secara mandiri.



**Aktivitas Komunitas Belajar jenjang  
PAUD Dikmas**

### Program dan kegiatan Pendukung

Walaupun program dan kegiatan pendukung ketercapaian IKK1.1 ini telah dilaksanakan oleh BP PAUD di Januari-Juni 2022 namun demikian BPMP Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan beberapa program dan kegiatan yang untuk mendukung capaian kinerja tersebut walapun hanya sebatas terkait program PSP, sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi ke Pemda PSP angkatan 3;
- 2) Advokasi ke Pemda PSP angkatan 2 dan 3;
- 3) Penjaringan komitmen daerah angkatan 3;
- 4) Coaching klinik ke Pemda;
- 5) Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah;
- 6) Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota;
- 7) Bimtek SP untuk tim PMO;
- 8) Bimbingan Teknis Program SP ke Pemda;
- 9) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK;
- 10) Pertemuan periodik PMO;
- 11) Mendampingi Pemda dalam Perencanaan SP;
- 12) Penguatan peran UPT Kemendikbud dalam pendampingan sekolah penggerak;
- 13) Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data;
- 14) Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan;
- 15) Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda;
- 16) Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar;

### Hambatan atau Permasalahan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya nilai persentase di beberapa indikator rapor penilaian kualitas data pokok pendidikan;
- 2) Masih rendahnya partisipasi guru dalam pemanfaatan platform merdeka mengajar;
- 3) Masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses aktivasi akun belajar.id; dan
- 4) Masih terdapat guru PAUD yang pendidikannya SMA sederajat.

### Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Melakukan uji petik, pendampingan, serta evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan data pokok pendidikan kemudian mengadvokasi pemda agar bisa turut bersama menyelesaikan permasalahan tersebut;
- 2) Membuat tim khusus yang dibagi perwilayah yang bertugas untuk terus memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam proses pemanfaatan PMM dan proses aktivasi akun belajar; dan
- 3) Melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk bisa melakukan pemetaan dan pengadaan guru PAUD dengan kualifikasi pendidikan S1.

### Strategi yang Dilakukan

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas data pokok pendidikan;
- 2) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui kegiatan daring terkait pemanfaatan PMM dan akun belajar; dan
- 3) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan rekrutmen guru PAUD dengan kualifikasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.



## b. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

### Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pendidikan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen nasional. Adapun definisi operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya dan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

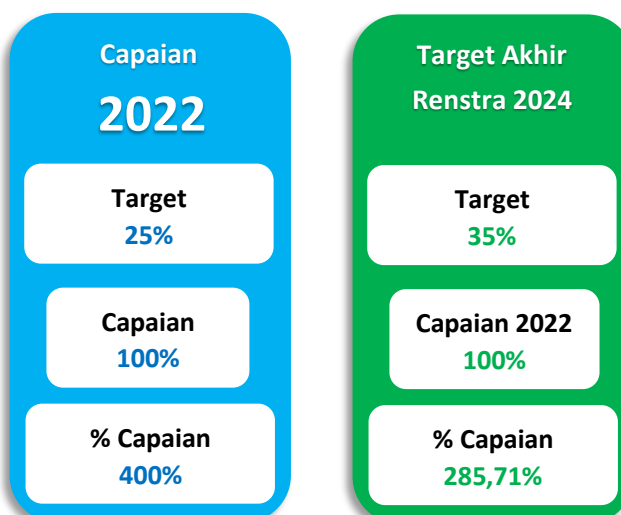
Sama dengan IKK 1.1, dikarenakan rapor pendidikan tahun 2022 belum terbit sampai dengan Januari 2023, maka untuk indikator 1.2 tentang persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) ini dihitung berdasarkan data akreditasi 2021-2022 yang bersumber dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP. Adapun metode perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IKK\ 1.2 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

- $i$  : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan  
 $flag(\Delta_i)$  : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

Berikut ini diuraikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang telah dihitung berdasarkan hasil akreditasi tahun 2021-2022:



Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.2. terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.2. adalah sebesar 25% Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dan capaiannya adalah sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa persentase capaian IKK 1.2 ini tercapai sebesar 400% jauh diatas target yang telah ditetapkan walaupun dalam perhitungan IKK ini menggunakan nilai Akreditasi.

Dikarenakan pada tahun 2022 terdapat revisi Renstra Kemendikbudristek yang berakibat berubahnya IKK yang tertuang dalam Renstra maupun Perjanjian Kinerja BPMP maka IKK terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) ini baru diintervensi oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2022, oleh karena itu **belum dapat disajikan data perbandingan capaian tahun sebelumnya**. Selain itu asesmen nasional baru dilaksanakan di tahun 2021 sehingga untuk menghitung capaian tersebut belum memiliki data pembandingan.

Berikut ini disajikan rincian data kenaikan proses akreditasi kab/kota/provinsi di Kalimantan Utara setelah melalui proses pembobotan:

Provinsi/Kab/Kota	Bobot 2021	Bobot 2022	selisih	Keterangan
Kab. Bulungan	12,82%	24,24%	11,43%	Mengalami Kenaikan
Kab. Malinau	15,72%	22,87%	7,15%	Mengalami Kenaikan
Kab. Nunukan	18,46%	26,22%	7,77%	Mengalami Kenaikan
Kab. Tana Tidung	18,85%	36,13%	17,28%	Mengalami Kenaikan
Kota Tarakan	9,73%	30,11%	20,38%	Mengalami Kenaikan
Prov. Kalimantan Utara	23,32%	25,47%	2,15%	Mengalami Kenaikan

(Sumber: Ditjen Paudikdasmen)

Terlihat pada data diatas bahwa rata-rata satuan pendidikan di kabupaten, kota, maupun provinsi di prov. Kalimantan Utara mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dari 6 (enam) daerah tidak ada yang mengalami penurunan sehingga capaian bisa menjadi 100%. Oleh karena target yang ditetapkan hanya 25%, maka persentase capaiannya menjadi sebesar 400%.

## Capaian PSP (Program Sekolah Penggerak) Jenjang Dikdas dan Dikmen

Program Sekolah Penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Akselerasi transformasi sekolah dilakukan di seluruh kondisi sekolah baik negeri maupun swasta, agar bisa bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

Berikut data capaian sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Kab/Kota per jenjang:

No	Kab/Kota					Jumlah
		SD	SMP	SMA	SLB	
1	Bulungan	8	4	3	0	15
2	Tarakan	6	1	1	0	8
3	Nunukan	10	4	5	1	20
4	Malinau	0	1	0	0	1
5	Tana Tidung	2	1	2	1	6
Total		26	11	11	2	50

Sedangkan jika dibagi per angkatan adalah sebagai berikut:

No	Kab/Kota	Angkatan			Jumlah
		1	2	3	
1	Bulungan	0	10	5	15
2	Tarakan	0	0	8	8
3	Nunukan	11	8	1	20
4	Malinau	0	0	1	1
5	TanaTidung	0	4	2	6
Total		11	22	17	50

Adapun sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen jika dibagi berdasarkan angkatan per jenjang adalah sebagai berikut:

Angkatan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	SLB	
Angkatan 1	5	2	3	1	11
Angkatan 2	13	6	2	1	22
Angkatan 3	8	3	6	0	17
Total	26	11	11	2	50

Sama dengan jenjang PAUD sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen yang telah lulus dalam seleksi khususnya untuk angkatan 1 dan 2, diberi *treatment* khusus yakni dengan difasilitasi seorang fasilitator pendamping yang biasa disebut FSP (fasilitator sekolah penggerak). Setelah

melalui proses pendampingan secara intens dan dilakukan PMO secara periodik, maka sekolah penggerak ini dibagi lagi berdasarkan tingkat kemampuan untuk beradaptasi dengan program-program dalam sekolah penggerak khususnya implementasi kurikulum merdeka. Sekolah penggerak dibagi menjadi 3 kategori pendampingan sebagai berikut:

1. Intensif : pendampingan oleh FSP dilakukan rutin dan PMO sekolah dilaksanakan setiap satu bulan sekali;
2. Menengah : pendampingan oleh FSP dan PMO sekolah dilakukan setiap 2 bulan sekali; dan
3. Mandiri : pendampingan oleh FSP dan PMO sekolah setiap 3 bulan sekali.

Berikut data sekolah penggerak jika dilihat berdasarkan metode pendampingan per Kab/Kota:

Metode Pendampingan	Kab/Kota			Jumlah
	Bulungan	Nunukan	TanaTidung	
Intensif	6	8	2	16
Menengah	4	8	2	14
Mandiri	0	3	0	3
Total	10	19	4	33

Sedangkan jika dibagi per jenjang adalah sebagai berikut:

Metode Pendampingan	Jenjang					Jumlah
	PAUD	SD	SMP	SMA	SLB	
Intensif	0	10	4	0	2	16
Menengah	0	8	3	3	0	14
Mandiri	0	0	0	3	0	3
Total	0	18	7	6	2	33

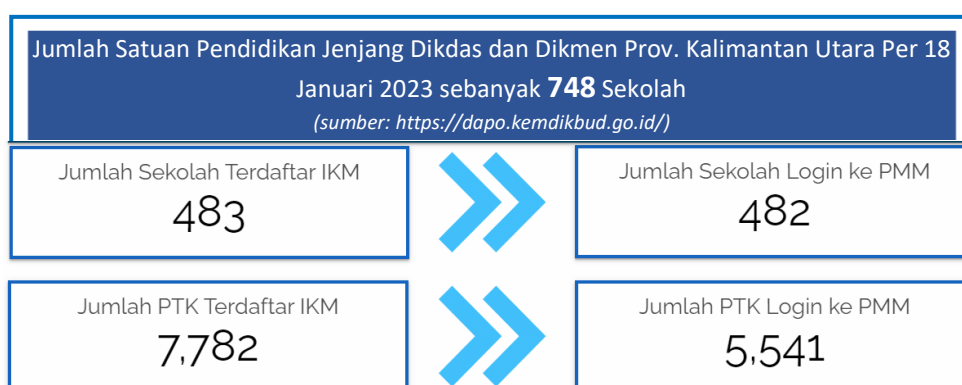
Adapun sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen jika dibagi berdasarkan metode pendampingan per angkatan adalah sebagai berikut:

Metode Pendampingan	Angkatan		Jumlah
	1	2	
Intensif	4	12	16
Menengah	5	9	14
Mandiri	2	1	3
Total	11	22	33

Data diatas telah menggambarkan data capaian PSP di provinsi Kalimantan Utara, namun jika dilihat secara umum, jumlah sekolah penggerak jenjang Dikdas dan Dikmen angkatan 1, 2, dan 3 adalah sebanyak 50 sekolah. Sedangkan untuk angkatan 1 dan 2 yang telah memperoleh pendampingan FSP adalah sebanyak 33 sekolah.

## Capaian IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) Jenjang Dikdas dan Dikmen

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang merupakan kurikulum yang terkenal sebagai pembelajaran yang memiliki kurikulum beragam, lebih mengoptimalkan terkait materi atau konten yang memberi peserta didik cukup waktu untuk mengeksplorasi konsep dan memperkuat kemampuan mereka. Selama implementasi kurikulum merdeka (IKM), guru memiliki keleluasaan untuk memilih dari berbagai perangkat pendidikan. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Kurikulum ini menjadi pilihan bagi seluruh satuan pendidikan yang merupakan satuan pendidikan dalam proses akuisisi data yang bersedia menerapkan kurikulum pembelajaran mandiri.



Dikmen yang telah melaksanakan IKM secara mandiri di provinsi Kalimantan Utara sudah sebanyak 483 sekolah, dari 483 sekolah tersebut 482 sekolah telah melakukan login PMM. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah PTK dari 483 sekolah tersebut adalah sebanyak 7.782 PTK dan 5.541 diantaranya telah melakukan login PMM (Platform Merdeka Mengajar).

Adapun jumlah sekolah berdasarkan tipe sekolah IKM adalah sebagai berikut:

Adoption Rate Sekolah Berdasarkan Tipe Sekolah IKM				
	Tipe Sekolah	Jumlah Sekolah Terdaftar	Jumlah Sekolah Login ke PMM	Adoption Rate
1.	Pilihan 1 : Mandiri Belajar	328	327	99.7%
2.	Pilihan 2 : Mandiri Berubah	115	115	100%
3.	Pilihan 3 : Mandiri Berbagi	6	6	100%
4.	SP	50	50	100%
	<b>Grand total</b>	<b>483</b>	<b>482</b>	<b>99.79%</b>

(Sumber : Dasbor IKM Per 21 Januari 2023)

Sedangkan jika ditinjau dari segi wilayah kab/kota adalah sebagai berikut:

	Kabupaten / Kota	Jumlah Sekolah Terdaftar	Jumlah Sekolah Login ke PMM	Adoption Rate
1.	Kab. Bulungan	192	192	100%
2.	Kota Tarakan	97	97	100%
3.	Kab. Malinau	84	83	98.81%
4.	Kab. Nunukan	67	67	100%
5.	Kab. Tana Tidung	43	43	100%

(Sumber : Dasbor Implementasi Kurikulum Merdeka Per 21 Januari 2023)

dari data diatas terlihat bahwa dari semua wilayah yang ada di Prov. Kalimantan Utara untuk jenjang Dikdas dan Dikmen hanya kab. Malinau yang capaian login PMM-nya belum 100%.

Dari semua PTK yang telah login PMM dapat dirincikan lagi tingkat pemanfaatan PMM sebagai berikut:

Tipe Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Guru Menonton Video	Jumlah Guru Mengerjakan Quiz	Jumlah Guru Submít Refleksi	Jumlah Guru Memulai Posttest	Jumlah Guru Lulus Posttest	Jumlah Guru Submit Aksi Nyata
SP	879	548	548	517	488	463	267
Pilihan 1 : Mandiri Belajar	4.466	2.445	2.445	2.302	2.166	2.043	1.221
Pilihan 2 : Mandiri Berubah	1.913	1.132	1.132	1.082	1.019	963	531
Grand Total	7.258	4.125	4.125	3.901	3.673	3.469	2.019

(Sumber : Dasbor Implementasi Kurikulum Merdeka Per 21 Januari 2023)

### Capaian Aktivasi Akun Belajar.id Jenjang Dikdas dan Dikmen

Akun belajar.id merupakan nama akun (User ID) yang bertanda belajar.id dan kata sandi (password) yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan akun belajar tersebut sebagai berikut:

1. Lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti: konferensi video, dokumen daring, pengarsipan kelas, dan lain-lain;
2. Dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek hanya dengan satu akun;
3. Menyimpan data secara daring dengan lebih aman;
4. Mengakses dan menggunakan Chromebook; dan
5. Menerima informasi resmi dari Kemendikbudristek.

Jumlah Akun Terdaftar di Dapodik	Total Akun Tersedia	Jumlah Akun Sudah Mengaktifasi	% Aktivasi Akun belajar.id
146,225	81,625	61,586	75.45%

(Sumber : Dasbor Aktivasi Akun Belajar Per 18 Januari 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa akun yang tersedia di Dapodik untuk jenjang PAUD sebanyak 146.225 akun namun yang tersedia adalah sebanyak 81.625 akun. Dari total akun yang tersedia tersebut 75,45% diantaranya telah melakukan aktivasi. Adapun aktivasi akun belajar jika dipantau dari masing-masing kab/kota jenjang Dikdas dan Dikmen adalah sebagai berikut:

	Kota / Kabupaten	Akun Tersedia 2	% Aktivasi 1
1.	Kab. Tana Tidung	3,536	86.65%
2.	Kab. Bulungan	17,288	77.57%
3.	Kota Tarakan	27,628	76.44%
4.	Kab. Nunukan	23,675	74.61%
5.	Kab. Malinau	9,498	66.61%

(Sumber : Dasbor Aktivasi Akun Belajar Per 18 Januari 2023)

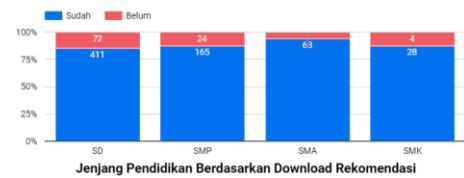
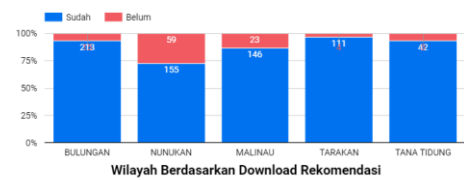
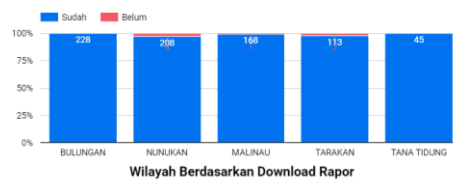
## Capaian PBD (Perencanaan Berbasis Data) Jenjang Dikdas dan Dikmen

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Total Sekolah <b>771</b>	Sudah Login <b>768</b>	Sudah Rapor <b>762</b>	Sudah PBD <b>667</b>
	Belum Login <b>3</b>	Belum Rapor <b>9</b>	Belum PBD <b>104</b>

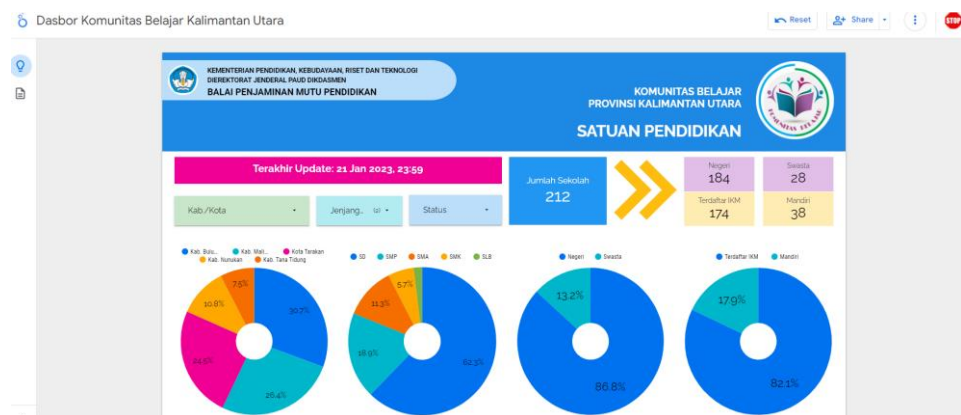
(Sumber: <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/monev-akses-rapor-pendidikan/> Per 23 Januari 2023)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dari total 771 satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen, sebanyak 768 sekolah telah melakukan akses/login Rapor Pendidikan, 762 sekolah telah mendownload indikator, dan 667 sekolah telah melakukan download lembar PBD. Maka dapat diketahui bahwa masih terdapat 3 sekolah belum mengakses Rapor Pendidikan, 9 sekolah belum download indikator, dan 104 sekolah belum download lembar PBD.



## Program Inovasi

### Dasbor Komunitas Belajar Kalimantan Utara Jenjang Dikdas dan Dikmen



BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan sebuah media informasi untuk mempermudah memantau aktivitas komunitas belajar di Prov. Kalimantan Utara. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, komunitas belajar mendukung guru, tenaga kependidikan dan pendidik lainnya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi Kurikulum Merdeka. Komunitas Belajar yang terdaftar adalah komunitas belajar dari sekolah IKM maupun daftar secara mandiri. Aktivitas yang dapat dipantau melalui dashboard ini adalah diantaranya:

1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan komunitas belajar di satuan pendidikan;
2. Jenis pembahasan saat kegiatan;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan komunitas; dan
4. Durasi yang dilaksanakan saat kegiatan.



Gambar diatas menunjukkan fasilitas yang disediakan oleh komunitas belajar pada satuan pendidikan. Dengan advokasi yang terus dilakukan diharapkan satuan pendidikan dapat membentuk komunitas belajar kemudian mendaftarkan komunitas belajarnya ke BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui link <https://s.id/komunitas-belajar-kaltara>, setelah mendaftar komunitas belajar didorong untuk melakukan pengisian kegiatan mingguan. Komunitas belajar juga dapat memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, atau meminta pendampingan jika mereka membutuhkan melalui menu **Butuh Bantuan**.

Berikut ini disajikan informasi terkait capaian Komunitas Belajar Jenjang Dikdas dan Dikmen:



(Sumber: <https://datastudio.google.com/u/0/reporting/47b09708-9e66-4026-b4bb-0566cd3583db/page/Zhb7C> Per 21 Januari 2023)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa terdapat 212 sekolah yang terdaftar dan dapat dipantau aktivitas komunitas belajarnya, 184 diantaranya adalah sekolah negeri, 28 sekolah swasta, 174 sekolah merupakan sekolah IKM, dan 38 sekolah secara mandiri.





**Aktivitas Komunitas Belajar jenjang Dikdas dan Dikmen**

## Kegiatan Inovasi

### Webinar Enggang Benuanta



Peningkatan Literasi TIK bagi Guru dan Penyusunan Buku Pedoman Guru 2023

BPMP Provinsi Ka...  
1.42K subscribers

Subscribe

11

Share



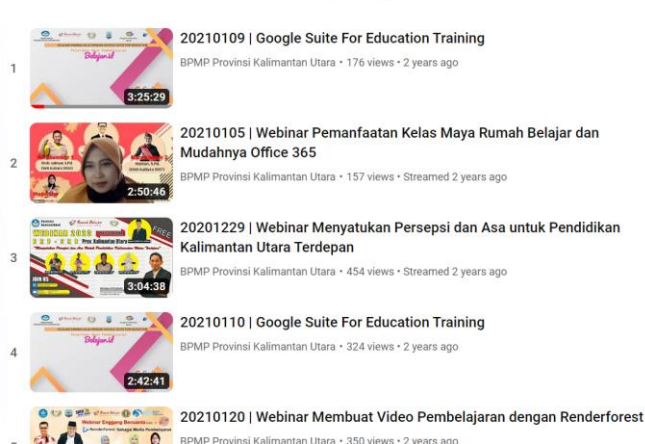
Pemanfaatan PMM untuk Merdeka Belajar dan Penyusunan DUPAK untuk Pegawai

BPMP Provinsi Ka...  
1.42K subscribers

Subscribe

13

Share



Webinar Enggang Benuanta merupakan kegiatan inovasi dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini diadakan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak potensial di provinsi Kaltara seperti Duta Rumah Belajar, Google Master Trainer, dan lainnya lebih khusus pihak-pihak yang memiliki motivasi bersama dalam meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kompetensi guru dibidang teknologi dan informasi di provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan Webinar Enggang Benuanta ini samapai pada akhir tahun 2022 sudah mencapai hampir 70 episode dan telah menerbitkan ribuan sertifikat untuk para peserta yang berhasil melalui setiap tahapan kegiatan mulai dari mengikuti live webinar sampai berhasil mengerjakan tugas mandiri selama seminggu sebagai syarat memperoleh sertifikat. Kegiatan ini juga sangat membantu para guru untuk mengembangkan kompetensinya khususnya dalam pemanfaatan IT dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini juga sangat membantu guru-guru dalam proses kenaikan pangkat. Selain guru-guru dari wilayah provinsi Kalimantan Utara terdapat pula guru-guru dari luar wilayah Kaltara yang mengikuti kegiatan ini.

Seri episode kegiatan **Enggang Benuanta** dapat disaksikan pada youtube BPMP Provinsi Kalimantan Utara berikut:

<https://www.youtube.com/@BPMPProvinsiKalimantanUtara>

## Kegiatan Inovasi

### Ngopi Satu



Ngopi Satu Jilid III Peran Mitra Pembangunan dalam IKM serta Optimalisasi PMM

BPMP Provinsi Ka...  
1.42K subscribers

Subscribe

19

Share

Ngopi Satu Jilid 1 - Persiapan IKM

BPMP Provinsi Ka...  
1.42K subscribers

Subscribe

7

Share

Ngopi Satu adalah singkatan dari “ngobrol pendidikan santai dan bermutu”. Kegiatan ini diadakan dalam rangka optimalisasi percepatan implementasi kebijakan-kebijakan pendidikan dari Kemendikbudristek khususnya terkait program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, kemitraan, dan program-program lainnya yang penting untuk penjaminan mutu pendidikan di Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring yang narasumbernya berasal dari BPMP Kaltara sendiri maupun dari jajaran Kemendikbudristek sehingga selain sangat efektif dalam percepatan implementasi kebijakan Kemendikbudristek juga sangat efisien dalam penggunaan anggaran. Kegiatan ini mulai dicetuskan ditahun 2022 dan sampai saat ini telah dilaksanakan puluhan jilid dengan bermacam-macam pembahasan diantaranya:

1. Pemanfaatan PMM dalam implementasi kurikulum merdeka;
2. Peran mitra pembangunan dalam IKM;
3. Perencanaan Berbasis Data;
4. Persiapan IKM;

dan masih banyak lagi materi-materi pembahasan yang dikulit dalam kegiatan Ngopi Satu ini. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai unsur mulai dari Dinas Pendidikan, pengawas sekolah, kepala satuan pendidikan, guru, bahkan peserta didik juga dapat mengikuti kegiatan ini karena kemudahan untuk mengaksesnya. Bagi peserta yang tidak dapat mengikuti melalui video conference, para peserta juga dapat mengikuti melalui youtube BPMP Kaltara berikut:

<https://www.youtube.com/@BMPProvinsiKalimantanUtara>

### **Program dan kegiatan Pendukung**

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional;
- 2) Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan;
- 3) Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan pendidikan;
- 4) Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional;
- 5) Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional jenjang SMP SMA/SMK;
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan jenjang SMP SMA/SMK;
- 7) Pendampingan Posko AN tingkat daerah;
- 8) Sosialisasi ke Pemda angkatan 3;
- 9) Advokasi ke Pemda angkatan 2 dan 3;
- 10) Penjaringan komitmen daerah angkatan 3;
- 11) Coaching klinik ke Pemda;
- 12) Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah;
- 13) Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota;
- 14) Bimtek SP untuk tim PMO;
- 15) Bimbingan Teknis Program SP ke Pemda;
- 16) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK;
- 17) Pertemuan periodik PMO;
- 18) Mendampingi Pemda dalam Perencanaan SP;
- 19) Penguatan peran UPT Kemendikbud dalam pendampingan sekolah penggerak;

- 20) Fasilitasi/Pendampingan Penguatan SDM dan Kordinasi Persiapan Serta Pemantauan Pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran;
- 21) Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data;
- 22) Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan;
- 23) Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda;
- 24) Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar;
- 25) Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar;
- 26) Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran;
- 27) Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru;
- 28) Pendampingan implementasi Pedoman pembelajaran paradigma baru;
- 29) Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi;
- 30) Pendampingan implementasi pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi;
- 31) Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan;
- 32) Diseminasi Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan;
- 33) Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan; dan
- 34) Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan.



## Diseminasi Hasil Asesmen Nasional dan Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan Tahun 2022

### Hambatan atau Permasalahan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Pendampingan ke satuan pendidikan dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan AN belum bisa dilakukan kepada semua satuan pendidikan di Kaltara disebabkan masih banyaknya lokasi yang tidak terjangkau oleh internet dan keterbatasan anggaran;
- 2) Masih rendahnya nilai persentase beberapa indikator penilaian kualitas data pokok pendidikan;
- 3) Masih rendahnya partisipasi guru dalam pemanfaatan platform Merdeka Mengajar; dan
- 4) Masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses aktivasi akun belajar.id.

### Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Terus melakukan advokasi ke pemda khususnya dinas pendidikan agar bisa turut dalam proses pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN khususnya satuan pendidikan yang masih berada pada lokasi-lokasi yang sulit diakses dan tidak memiliki jaringan internet;
- 2) Melakukan uji petik, pendampingan, serta evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan data pokok pendidikan kemudian mengadvokasi pemda agar bisa turut bersama menyelesaikan permasalahan tersebut; dan
- 3) Membuat tim khusus yang dibagi perwilayah yang bertugas terus memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam proses pemanfaatan PMM dan proses aktivasi akun belajar.

### Strategi yang Dilakukan

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN khususnya satuan pendidikan yang masih berada pada lokasi-lokasi yang sulit diakses dan tidak memiliki jaringan internet;
- 2) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas data pokok pendidikan;
- 3) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui kegiatan daring terkait pemanfaatan PMM dan akun belajar.

## 2. Sasaran Kegiatan 2 (dua)

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Peningkatan tata kelola juga merupakan salah satu prioritas BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada Renstra tahun 2020-2024 untuk mentransformasi pelayanan publik, yang antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik, antara lain dengan terus melakukan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan pendukung terhadap implementasi ZI WBK, dan pembenahan sistem akuntabilitas instansi mulai dari pembenahan kinerja pegawai maupun kinerja instansi khususnya BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024 juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan khususnya di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya sangat kompleks menjadi lebih sederhana, misalnya pemanfaatan asesmen nasional pendidikan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan dan penyederhanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik.

Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK), sebagai berikut:



### a. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

#### **Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.**

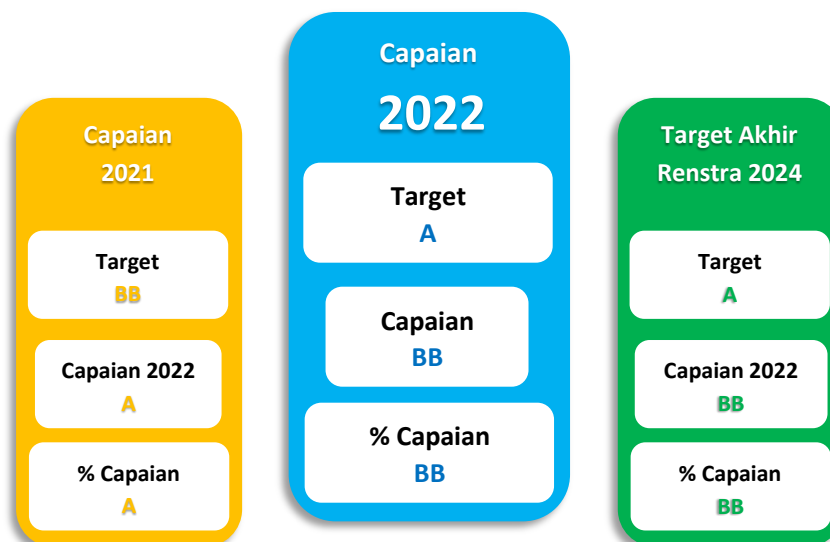
Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Nilai SAKIP dihitung berdasarkan 5 komponen penilaian yaitu:

Komponen	Bobot Penilaian
1. Perencanaan Kinerja	30%
2. Pengukuran Kinerja	25%
3. Pelaporan Kinerja	15%
4. Evaluasi Internal	10%
5. Capaian Kinerja	20%
Total Nilai	100%

Berikut ini diuraikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja 2.1 yaitu “Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara”:



Data diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 target yang diperjanjikan yakni nilai sakip dengan predikan **BB** bisa dicapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dengan predikat **A** sedangkan pada tahun 2022 BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan nilai capaian terkait Sakip ini dari **A** menjadi **BB**, sehingga target yang telah ditetapkan ditahun 2022 yakni **A** tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi dari Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal

Kemendikbudristek capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Laporan Kinerja Tahun 2021 belum menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
2. Laporan Kinerja Tahun 2021 belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber anggaran; dan
3. Format Notula belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2021.

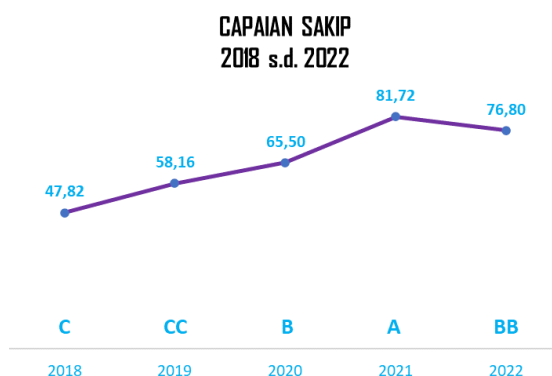
Sehingga Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja tahun berikutnya agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
2. Laporan Kinerja tahun berikutnya agar menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber anggaran, hasil efisiensi dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja yang dapat dikuantifikasikan; dan
3. Notula perlu ditingkatkan kualitasnya dengan dilengkapi dan atau memuat rekomendasi/arahan dari pimpinan dalam rangka peningkatan kinerja.

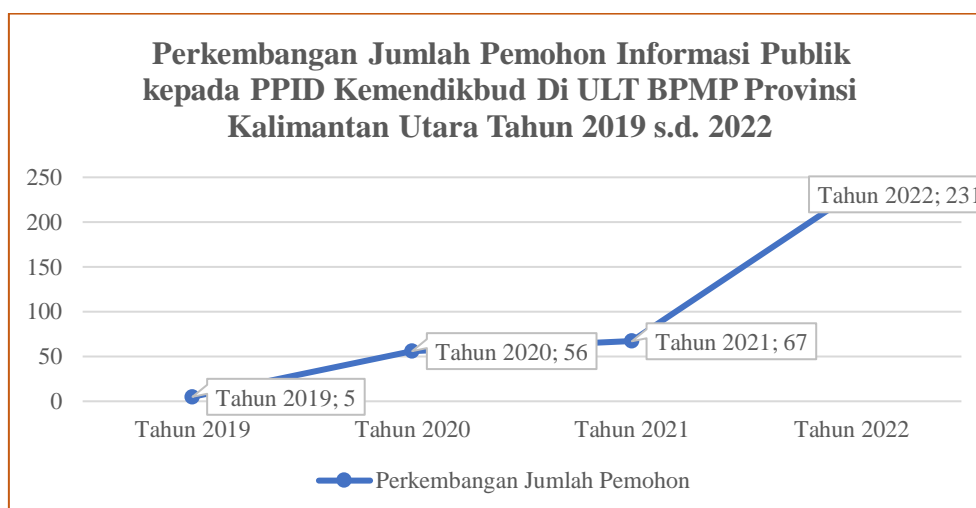
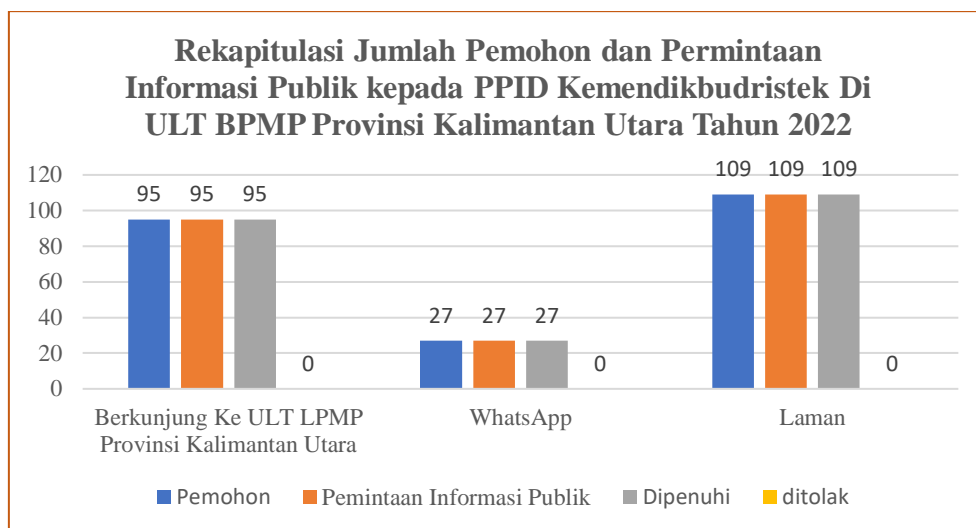
Adapun rincian capaian tiap indikator penilaian Sakip dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22.5
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11.55
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18.75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		BB	76.80

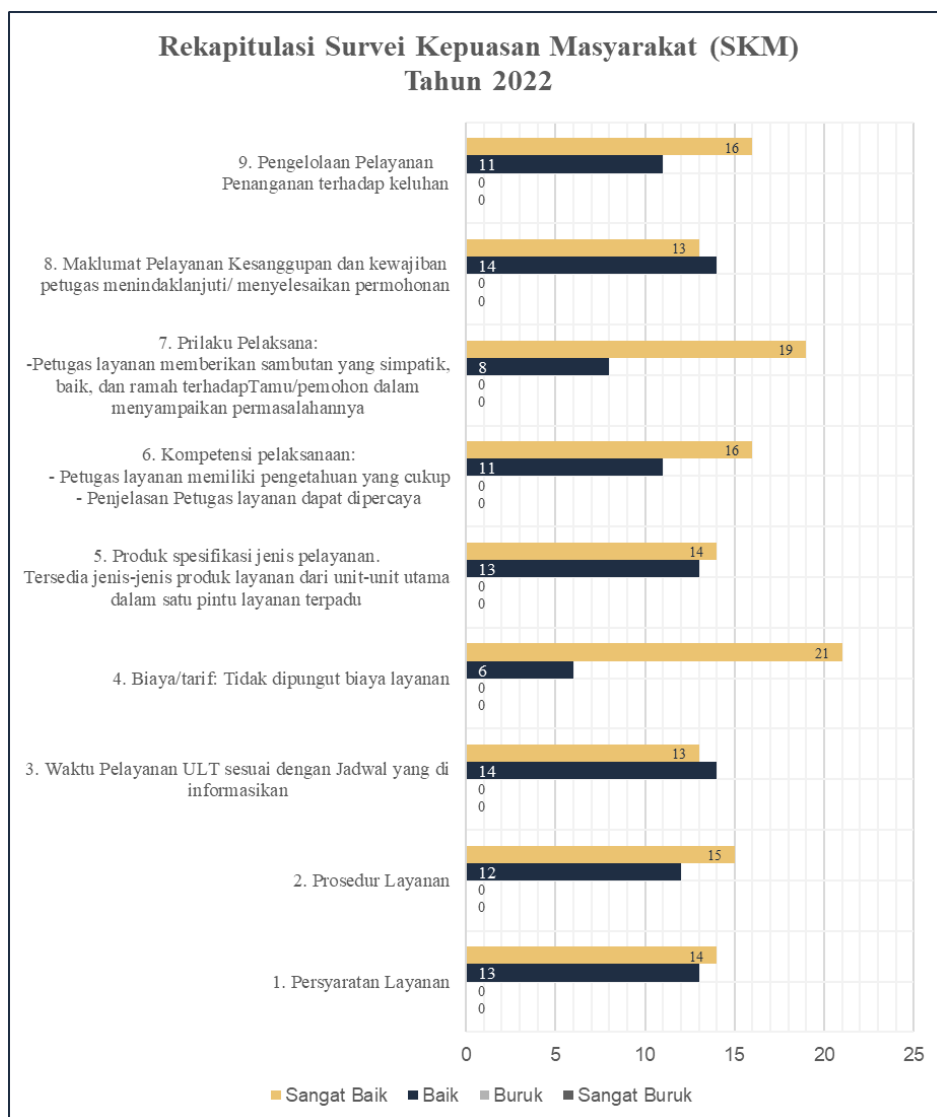
Capaian Sakip BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun mengalami progres peningkatan yang sangat baik, namun pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dikarenakan beberapa permasalahan tersebut diatas. Siklus capaian Sakip BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



## Capaian Layanan Informasi Publik



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pemohon informasi publik kepada PPID Kemendikbud di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, berjumlah 231 pemohon. Dari 231 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 231 permintaan dan dipenuhi 231 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 0 permintaan. Dari gradik diatas juga dapat dilihat trend permohonan informasi publik kepada PPID Kemendikbud di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara semakin terbuka dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik.



Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Tujuan dari survei ini adalah mengukur kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Grafik diatas menunjukkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilakukan oleh ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022.

## Kegiatan Inovasi S.KOM (Sharing Komunikasi)



**S.KOM** adalah singkatan dari Sharing Komunikasi. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin mingguan yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi setelah melakukan olahraga pagi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan diantaranya:

1. Diseminasi hasil pelaksanaan kegiatan eksternal yang diikuti oleh pegawai;
  2. Penyampaian informasi-informasi penting untuk internal lembaga yang lebih efektif jika disampaikan secara tatap muka;
  3. Membangun komunikasi yang lebih baik antara pegawai; dan
  4. Menambah keakraban dan rasa persaudaraan antarpegawai.
- Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kinerja pegawai, menambah pengetahuan dan kompetensi pegawai yang pada akhirnya mampu mendorong ketercapaian kinerja lembaga.

### Program dan kegiatan Pendukung

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Penyusun dan Evaluasi Sakip;
- 2) Rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
- 3) Melaksanakan kegiatan workshop penguatan peningkatan kapasitas SDM UPT Pauddikdasmen;
- 4) Penyusunan dan penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan melalui bedah POK;
- 5) Penyusunan Perjanjian Kinerja antara kepala BPMP dengan Dirjen Paud dikdas dan dikmen;
- 6) Sosialisasi PK kepada seluruh Warga BPMP Provinsi Kalimantan Utara;
- 7) Penyusunan rencana aksi melalui aplikasi spasikita;
- 8) Mempublikasikan dokumen SAKIP melalui Website BPMP Provinsi Kalimantan Utara;
- 9) Menyusun rencana kinerja tahunan dalam aplikasi spasikita;
- 10) Rapat evaluasi kinerja triwulan yang dilaksanakan secara periodik minimal;
- 11) Melaksanakan apel pagi dalam rangka sosialisasi kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan setiap hari senin;
- 12) Menindaklanjuti hasil dari LHE yang diterbitkan oleh Biro Perencanaan;
- 13) Melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi spasikita untuk sakip 2022;
- 14) Mengikuti kegiatan penilaian mandiri keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Biro Hukum dan Kerjasama Masyarakat; dan
- 15) Mengikuti kegiatan penilaian calon satuan kerja ZI WBK yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek.



**Rapat Evaluasi dan Refleksi Program Kegiatan BPMP Kalimantan Utara Tahun 2022**

### Hambatan atau Permasalahan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Sebagian besar anggota dalam tim belum terlalu memahami terkait proses bisnis implementasi SAKIP. Dari semua anggota tim hanya 1 (satu) orang anggota saja yang memiliki sertifikat pelatihan SAKIP;
- 2) Keterlambatan penyusunan perjanjian kinerja akibat masih disusunnya Renstra Kemendikbudristek yang berkonsekuensi pada berubahnya Renstra turunannya, serta keterlambatan penyusunan SKP;
- 3) Terjadinya perubahan nomenklatur lembaga dari BPMP menjadi BPMP sehingga perlu beberapa penyesuaian khususnya terkait tugas dan fungsi lembaga dan juga berakibat bertambahnya beban target IKK karena bergabungnya PAUD ke dalam satker BPMP; dan
- 4) Masih terdapat beberapa dokumen sakin yang belum terpenuhi dikarenakan berubahnya metode penilaian sakin.

### Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan koordinasi dan komunikasi yang solid antara anggota tim, melakukan pengembangan diri secara mandiri dengan memanfaatkan media internet, dan melakukan usaha komunikasi dengan lembaga yang sejenis terkait implementasi SAKIP;
- 2) Mengikuti rapat penyusunan draft perjanjian kinerja bersama unit eselon 1 (satu) walaupun pelaksanaannya sebelum revisi Renstra Kemendikbud terbit;
- 3) Melakukan upaya koordinasi dan konsultasi secara intens dengan unit utama terkait penyesuaian tugas dan fungsi lembaga dan juga terkait penambahan beban target IKK karena bergabungnya PAUD ke dalam satker BPMP;
- 4) Memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk melakukan penyusunan dokumen SAKIP yang diperlukan.

### Strategi yang Dilakukan

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM tim Evaluasi Sakip dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan Sakip atau benchmarking/studitiru ke lembaga sejenis yang memiliki capaian Sakip peringkat terbaik;

- 2) Mendorong tim evaluasi Sakip kedepannya untuk melakukan upaya inisiatif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan;
- 3) Mendorong unit kerja untuk melakukan penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan untuk mendukung ketercapaian target dari IKK terkait peningkatan pembelajaran jenjang PAUD; dan
- 4) Mendorong tim evaluasi Sakip agar terus bekerja secara optimal melakukan pemenuhan dokumen-dokumen pendukung serta melakukan upaya-upaya yang seharusnya menjadi kewajiban lembaga dalam implementasi Sakip.



## b. Indikator Kinerja Kegiatan 2.2

### Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

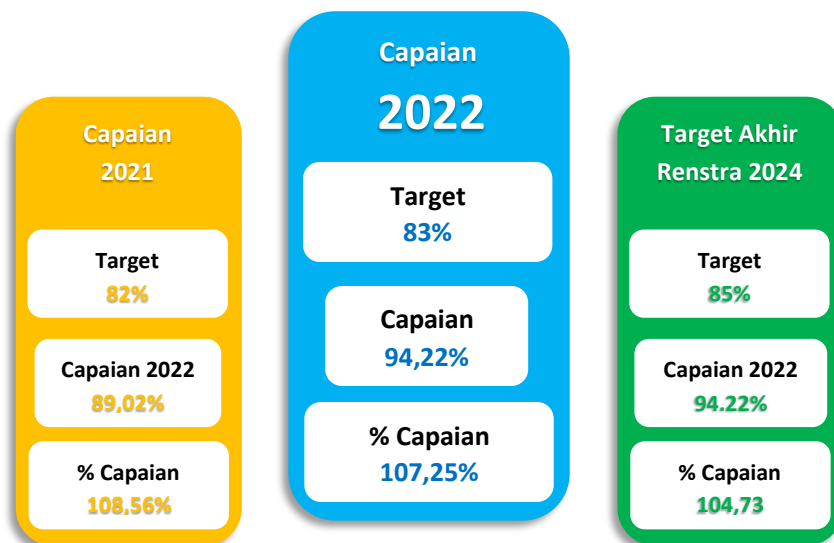
Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 /PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu:

- 1) Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 2) Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

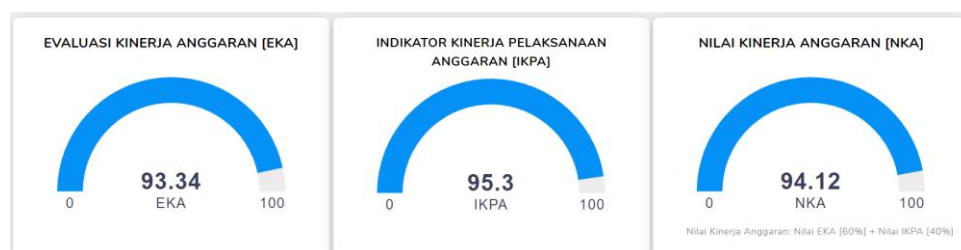
IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan PMK tersebut, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Berikut ini diuraikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja 2.2 yaitu “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara”:

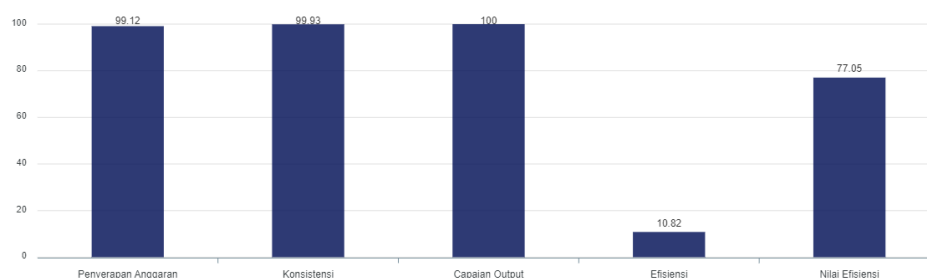


Data diatas menggambarkan bahwa pada tahun 2021 target yang diperjanjikan yakni nilai kinerja anggaran (NKA) dengan target **82%** bisa dicapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian **89,02%** sedangkan pada tahun 2022 BPMP Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami kenaikan dari **89,02%** menjadi sebesar **94,22%**, sehingga target yang telah ditetapkan ditahun 2022 yakni **83%** dapat tercapai dan melampaui target dengan persentase capaian sebesar **107,25%**. Capaian tahun 2022 ini juga mampu melampaui target akhir renstra dengan persentase capaian sebesar **104,73%**.



Gambar diatas menunjukkan dua capaian dari indikator penilaian NKA yakni EKA sebesar 93,34% dan IKPA sebesar 95,3%. Karena NKA diperoleh dari 60% nilai EKA dan 40% nilai IKPA, maka diperoleh capaian NKA sebesar **94,12%**. Jika diuraikan lagi masing-masing indikator penilaian dari EKA dan IKPA, maka gambarannya adalah sebagai berikut:

## Capaian EKA



Sumber: Spasikita menu Simproka 2022

Grafik diatas menunjukkan capaian dari masing-masing indikator EKA dimana nilai untuk indikator penyerapan anggaran sebesar 99,12%, Konsistensi sebesar 99,93%, Capaian Output sebesar 100%, dan efisiensi sebesar 77,05%. Oleh karena nilai EKA diperoleh dengan pembobotan berikut:

Bobot Penyerapan : 9,7%

Bobot Konsistensi : 18,2%

Bobot Capaian Rincian Output: 43,5%

Bobot Efisiensi : 28,6%

Maka diperoleh nilai EKA sebesar **93,34%**.

## Capaian IKPA

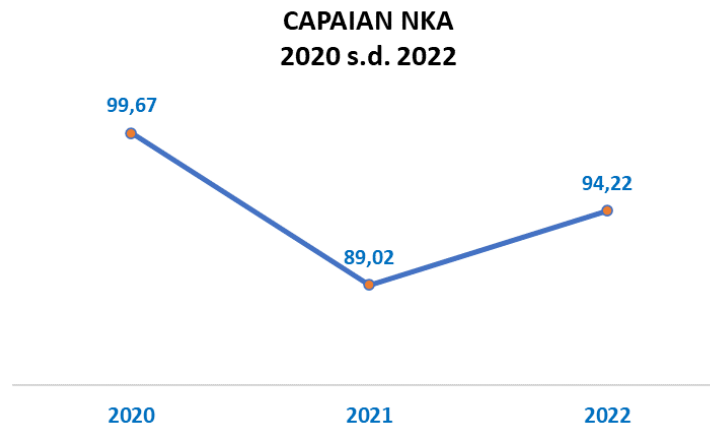
No	Pengukuran / Indikator	Bulan Desember 2022		
		Nilai	Bobot	Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran				
1	Revisi DIPA hasi	100,00	10	10,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	77,56	10	7,76
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				
3	Penyerapan Anggaran	94,75	20	18,95
4	Belanja Kontraktual	88,65	10	8,87
5	Penyelesaian Tagihan	100,00	10	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	99,75	10	9,98
7	Dispensasi SPM	95,00	5	4,75
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran				
8	Capaian Output	100,00	25	25,00
<b>TOTAL</b>			<b>100</b>	<b>95,30</b>
<b>Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)</b>				<b>95,30</b>

Sumber: MolK Kemdikbud 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa IKPA 2022 memiliki 8 indikator yang dinilai dengan nilai capaian sampai dengan Desember 2022 berturut-turut Revisi DIPA 100%, Deviasi Halaman III DIPA 77,56%, Penyerapan Anggaran 94,75%, Belanja Kontraktual 88,65%, Penyelesaian Tagihan

100%, Pengelolaan UP dan TUP 99,75%, dispensasi SPM 95%, dan Capaian Output 100%. Dengan melakukan pembobotan sesuai tabel diatas maka ditemukanlah hasil nilai IKPA sebesar **95,30%**.

Adapun siklus capaian NKA BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



### Program dan kegiatan Pendukung

Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti bimbingan teknis penilaian PIPK yang diselenggarakan oleh direktorat jenderal Paud, Dikdas dan Dikmen;
- 2) Melakukan penginputan capaian output pada aplikasi sakti maupun pada simproka secara priodik;
- 3) Melaksanakan kegiatan workshop penguatan peningkatan kapasitas SDM UPT Pauddikdasmen;
- 4) Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja per triwulan;
- 5) Penyusunan dan penyesuaian halaman III dipa tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan;
- 6) Pemantauan percepatan realisasi anggaran secara rutin melalui sakti maupun melalui MOLK Kemdikbudristek, OM Span maupun pada aplikasi Sakti;
- 7) Melakukan percepatan penyelesaian SPJ keuangan;
- 8) Melakukan upaya percepatan buka blokir anggaran belanja modal dengan rutin berkoordinasi dengan unit utama, DJA dan DJKN Kemenkeu;
- 9) Mengikuti kegiatan evaluasi anggaran yang dilaksanakan oleh unit utama maupun yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Kaltara;
- 10) Melakukan rapat penyesuaian program kegiatan melalui bedah POK per Triwulan dalam rangka mendorong ketercapaian masing-masing IKK; dan
- 11) Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara priodik per Triwulan.



**Rapat Evaluasi Capaian Kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021**

### Hambatan atau Permasalahan

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) Terdapat permasalahan pada penialain deviasi halaman III Dipa pada IKPA yakni terjadinya perbedaan rencana penarikan dana (RPD) halaman III Dipa triwulan III yang diajukan dengan RPD yang menjadi dasar penilaian di OM SPAN sehingga terjadi deviasi yang tinggi; dan
- 2) Terdapat sedikit permasalahan pada pengelolaan UP/TUP sehingga nilai indikator pengelolaan UP/TUP tidak sempurna;
- 3) Terlambatnya proses buka blokir belanja modal yang membebani realisasi anggaran. Hal ini disebabkan beberapa kondisi diantaranya:
  - Perlunya RKBMN perubahan menyesuaikan tahun berjalan; dan
  - Terjadinya perubahan struktur organisasi di internal DJKN Kementerian Keuangan yang menyebabkan lambatnya proses penetapan penanggung jawab terkait pengesahan RKBMN perubahan.
- 4) Terkendala dalam proses adaptasi terhadap aplikasi SAKTI dalam pengelolaan anggaran.

### Langkah Antisipasi

Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB Kalimantan Utara terkait permasalahan perbedaan halaman III Dipa tersebut, selanjutnya mengajukan surat pengajuan banding yang ditujukan kepada Direktur Pelaksana Anggaran DJPb sesuai arahan Kanwil DJPB Kalimantan Utara;
- 2) Melakukan koordinasi dengan bendahara terkait permasalahan yang terjadi pada pengelolaan UP/TUP yang menyebabkan nilai indikator pengelolaan UP/TUP tidak sempurna; dan
- 3) Secara intens melakukan koordinasi dengan unit utama, DJA dan DJKN Kementerian Keuangan RI terkait proses pengesahan RKBMN perubahan;
- 4) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens kepada Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara dan KPPN Tanjung Selor.

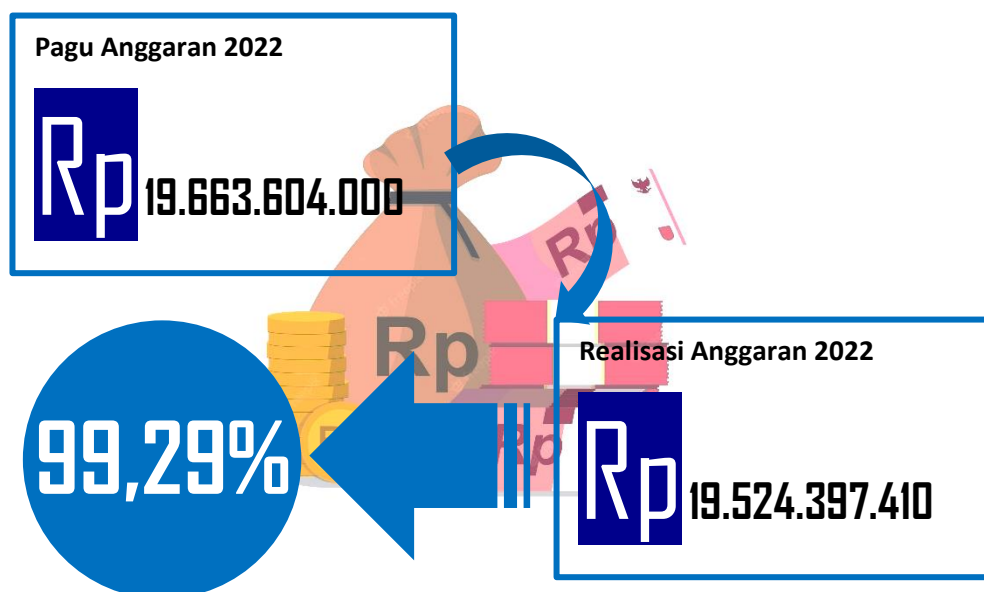
### Strategi yang Dilakukan

Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan proses penyusunan rencana penarikan dana (RPD) yang simetris dengan rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan kesepakatan bersama dengan tim keuangan satker terkait RPD yang disusun, dan memantau proses pengajuan revisi ke Kanwil DJPB untuk memastikan pengajuan sudah sesuai dengan realisasi;
- 2) Mendorong tim keuangan untuk memahami hal-hal yang dapat mengurangi nilai indikator pengelolaan UP/TUP untuk mempermudah melakukan antisipasi; dan
- 3) Melakukan pengajuan RKBMN perubahan sedini mungkin jika masih terdapat rencana pembangunan gedung negara yang memerlukan RKBMN.

## B. Realisasi Anggaran

BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 menerima pagu anggaran sebesar **Rp 19.663.604.000,-**. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp 19.524.397.410,-** dengan persentase daya serap anggaran sebesar **99,29%**.



Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.

Sasaran Kegiatan (SK)/ Sasaran Indikator	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
<b>Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen</b>			
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	Anggaran untuk IKK 1.1 telah diserap dan dilaksanakan kegiatannya oleh BPPAUD Prov. Kalimantan Timur dari Januari s.d. Juni 2022 sebelum likuidasi namun BPMP Kaltara masih bisa mengintervensi PAUD Dikmas melalui program PSP.		
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	<b>3.840.156.000</b>	<b>3.839.159.464</b>	<b>99,97%</b>

Sasaran Kegiatan (SK)/ Sasaran Indikator	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
<b>Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara</b>			
[IKK 2.1] Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	<b>15.823.448.000</b>	<b>15.685.237.946</b>	<b>99,13%</b>
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL			

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.604.582.000	0	2.601.877.187	99,90	2.601.877.187	99,90
2	BELANJA BARANG	7.166.443.000	0	7.164.601.781	99,97	7.164.601.781	99,97
3	BELANJA MODAL	9.892.579.000	0	9.757.918.442	98,64	9.757.918.442	98,64
	<b>TOTAL</b>	<b>19.663.604.000</b>	<b>0</b>	<b>19.524.397.410</b>	<b>99,29</b>	<b>19.524.397.410</b>	<b>99,29</b>



No	DIPA AWAL 2022		DIPA AKHIR 2022		Anggaran yang diefisiensi	Keterangan
	Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nama Kegiatan	Pagu Akhir		
1	Persiapan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional	6.436.000	Persiapan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Asesmen Nasional	700.000	5.736.000	Efisiensi
2	Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan	42.629.000	Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan	1.000.000	41.629.000	Efisiensi
3	Pendampingan Posko AN tingkat daerah	24.720.000	Pendampingan Posko AN tingkat daerah	4.800.000	19.920.000	Efisiensi
4	Diseminasi Hasil Asesmen Nasional	42.629.000	Sosialisasi ke Pemda angkatan 3	15.660.000	26.969.000	Efisiensi
5	Advokasi ke Pemda angkatan 2 dan 3	101.066.000	Advokasi ke Pemda angkatan 2 dan 3	0	101.066.000	Efisiensi
6	Penjaringan komitmen daerah angkatan 3	41.022.000	Penjaringan komitmen daerah angkatan 3	6.000.000	35.022.000	Efisiensi
7	Coaching klinik ke Pemda	635.617.000	Coaching klinik ke Pemda	403.251.000	232.366.000	Efisiensi
8	Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota	13.500.000	Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota	700.000	12.800.000	Efisiensi
9	Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK	87.600.000	Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK	6.576.000	81.024.000	Efisiensi
10	Penguatan peran UPT Kemendikbud dalam pendampingan sekolah penggerak	90.695.000	Penguatan peran UPT Kemendikbud dalam pendampingan sekolah penggerak	89.795.000	900.000	Efisiensi
11	Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data	51.076.000	Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data	700.000	50.376.000	Efisiensi
12	Bimtek platform rapor pendidikan	44.676.000	Bimtek platform rapor pendidikan	0	44.676.000	Efisiensi
13	Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan	85.870.000	Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan	49.173.000	36.697.000	Efisiensi
14	Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda	51.076.000	Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda	1.000.000	50.076.000	Efisiensi
15	Pelatihan perencanaan, penat usahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar	262.683.000	Pelatihan perencanaan, penat usahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar	156.166.000	106.517.000	Efisiensi
16	Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar	262.683.000	Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar	61.184.000	201.499.000	Efisiensi

No	DIPA AWAL 2022		DIPA AKHIR 2022		Anggaran yang diefisiensi	Keterangan
	Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nama Kegiatan	Pagu Akhir		
17	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	262.683.000	Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran	58.374.000	204.309.000	Efisiensi
18	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru	42.629.000	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru	1.000.000	41.629.000	Efisiensi
19	Pendampingan implementasi Pedoman pembelajaran paradigma baru	24.720.000	Pendampingan implementasi Pedoman pembelajaran paradigma baru	1.000.000	23.720.000	Efisiensi
20	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	42.629.000	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	2.600.000	40.029.000	Efisiensi
21	Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	43.220.000	Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	4.600.000	38.620.000	Efisiensi
22	Diseminasi Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	42.629.000	Diseminasi Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	700.000	41.929.000	Efisiensi
23	Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	29.500.000	Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan	16.500.000	13.000.000	Efisiensi
24	Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK	7.100.000	Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK	700.000	6.400.000	Efisiensi
25	Pendampingan penyusunan usulan DAK Fisik	42.629.000	Pendampingan penyusunan usulan DAK Fisik	0	42.629.000	Efisiensi
26	Pendampingan Implementasi DAK	42.629.000	Pendampingan Implementasi DAK	30.576.000	12.053.000	Efisiensi
27	Penyusunan Laporan DAK	16.560.000	Penyusunan Laporan DAK	0	16.560.000	Efisiensi
28	Penyusunan Bahan Update Data Transaksional DAK	7.100.000	Penyusunan Bahan Update Data Transaksional DAK	700.000	6.400.000	Efisiensi
29	Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	7.100.000	Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	700.000	6.400.000	Efisiensi
30	Sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik	59.523.000	Sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik	0	59.523.000	Efisiensi
31	Pelaksanaan Uji Petik DAPODIK	77.683.000	Pelaksanaan Uji Petik DAPODIK	30.560.000	47.123.000	Efisiensi
32	Diseminasi pemanfaatan data dapodik	41.129.000	Diseminasi Hasil Asesmen Nasional dan Pemanfaatan Data DAPODIK	23.014.000	18.115.000	Efisiensi
33	Evaluasi tindak lanjut hasil kualitas data	77.683.000	Evaluasi tindak lanjut hasil kualitas data	62.856.000	14.827.000	Efisiensi
<b>Anggaran Yang Diefisiensi Sebelum dikurangi Blokir AA</b>					<b>1.680.539.000</b>	
<b>Blokir AA</b>					<b>364.372.000</b>	
<b>Total Anggaran Yang Diefisiensi Setelah dikurangi Blokir AA</b>					<b>1.316.167.000</b>	

Tabel diatas menyajikan informasi kegiatan-kegiatan BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang anggarannya berhasil diefisiensi pada program prioritas. Anggaran yang berhasil diefisiensi adalah sebesar **Rp. 1.680.539.000,-** namun pada tahun 2022 terdapat anggaran yang diblokir *Automatic Adjustment* sebesar **Rp. 364.372.000,-** dan akhirnya dikembalikan ke BA BUN, maka total anggaran yang berhasil diefisiensi adalah sebesar **Rp. 1.316.167.000,-** dari total pagu sebesar **Rp. 19.663.604.000**. Efisiensi anggaran tersebut diperoleh dari sisa pelaksanaan

kegiatan yang telah mencapai target dan penyesuaian bentuk kegiatan dari kegiatan luring menjadi kegiatan daring, perubahan bentuk kegiatan tersebut bukan hanya menyerap sedikit anggaran bahkan terdapat kegiatan daring yang sama sekali tidak menyerap anggaran seperti yang ditampilkan pada tabel diatas pada kolom pagu dipa akhir.

Anggaran hasil efisiensi digunakan/ dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output dari kegiatan, penambahan kegiatan inovasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1.1 dan IKK 1.2 yaitu Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya dan Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dengan berbagai kegiatan seperti digambarkan pada tabel dibawah ini:

NO	DIPA AWAL 2022		DIPA AKHIR 2022		Anggaran yang dioptimalisasi	Keterangan
	Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nama Kegiatan	Pagu Akhir		
1	Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan pendidikan	42.629.000	Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan pendidikan	51.487.000	8.858.000	Optimalisasi
2	Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional	24.720.000	Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional	100.263.000	75.543.000	Optimalisasi
3	Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional	24.720.000	Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional jenjang SMP SMA/SMK	108.287.000	83.567.000	Optimalisasi
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan	24.720.000	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan jenjang SMP SMA/SMK	82.754.000	58.034.000	Optimalisasi
5	Sosialisasi ke Pemda angkatan 3	60.983.000	Advokasi ke Pemda angkatan 2 dan 3	153.186.000	92.203.000	Optimalisasi
6	Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah	101.066.000	Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah	209.044.000	107.978.000	Optimalisasi
7	Bimtek SP untuk tim PMO	56.022.000	Bimtek SP untuk tim PMO	143.645.000	87.623.000	Optimalisasi
8	Bimbingan Teknis Program SP ke Pemda	32.422.000	Bimbingan Teknis Program SP ke Pemda	96.305.000	63.883.000	Optimalisasi
9	Pertemuan periodik PMO	92.100.000	Pertemuan periodik PMO	137.824.000	45.724.000	Optimalisasi
10	Mendampingi Pemda dalam Perencanaan SP	22.200.000	Mendampingi Pemda dalam Perencanaan SP	66.676.000	44.476.000	Optimalisasi
11	Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan SDM	174.944.000	Fasilitasi/Pendampingan Penguatan SDM dan Kordinasi Persiapan Serta Pemantauan Pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	456.133.000	281.189.000	Optimalisasi
12	Pendampingan implementasi pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	43.940.000	Pendampingan implementasi pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi	57.370.000	13.430.000	Optimalisasi
13	Pendampingan/Persiapan Penyusunan Indikator Mutu Pendidikan Daerah	0	Pendampingan/Persiapan Penyusunan Indikator Mutu Pendidikan Daerah	7.800.000	7.800.000	Kegiatan Inovasi
14	Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK	43.440.000	Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK	71.558.000	28118000	Optimalisasi

NO	DIPA AWAL 2022		DIPA AKHIR 2022		Anggaran yang dioptimalisasi	Keterangan
	Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nama Kegiatan	Pagu Akhir		
15	Tim Teknis Pengadaan Konsultan Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2023 Pra DIPA	0	Tim Teknis Pengadaan Konsultan Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2023 Pra DIPA	7.800.000	7.800.000	Optimalisasi
16	Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan	0	Konsultan Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan	309.941.000	309.941.000	Optimalisasi
<b>Total Anggaran yang Dioptimalisasi</b>					<b>1.316.167.000</b>	



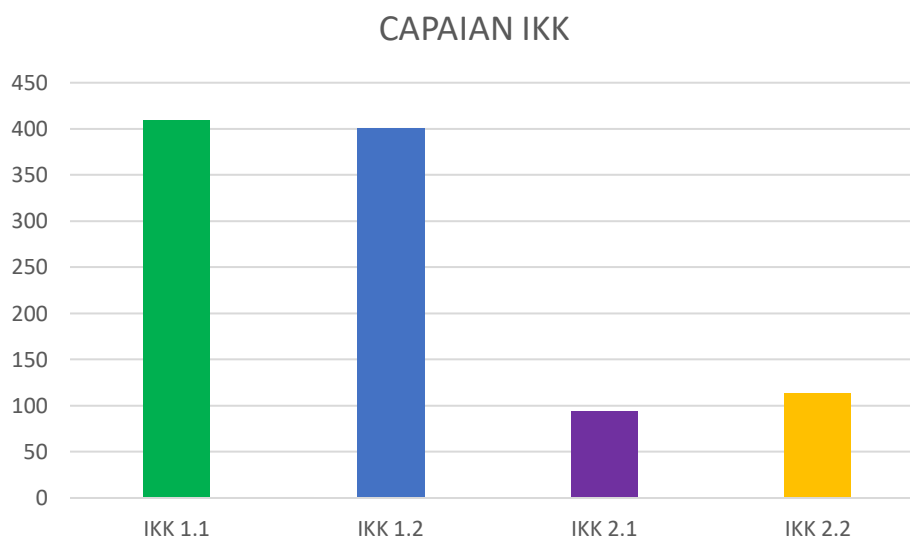
**BAB IV**

**PENUTUP**



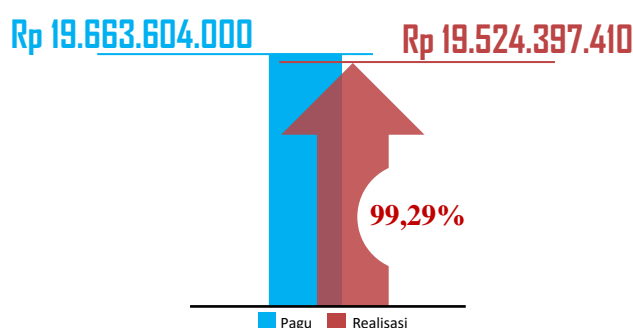
**B** PMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 menetapkan dua sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen; dan
2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara.



Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran kegiatan tersebut, tiga indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (>100%) yang ditetapkan sedangkan satu indikator kinerja kegiatan realisasinya belum mencapai target (93,98%) yakni indikator terkait Sakip.

Dari segi penyerapan anggaran, BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp 19.524.397.410,-** dari total **Rp 19.663.604.000,-** dengan persentase **99,29%**.



Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:

1. BPMP Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan;
2. Implementasi Kurikulum Merdeka belum diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan;
3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh satuan pendidikan pelaksana IKM belum optimal di wilayah remote area;

4. Rapor Pendidikan belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan berbasis data; dan
5. Belum maksimalnya pencapaian nilai Literasi dan Numerasi berdasarkan Profil Pendidikan;

Untuk meningkatkan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara ke depan, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan;
2. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan pelaksana IKM di daerah remote area untuk mengoptimalkan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
4. Membangun koordinasi kepada pemangku kepentingan dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan; dan
5. Melakukan sosialisasi dan pendampingan ke pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Literasi dan Numerasi peserta didik.

# LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



Pengukuran Kinerja



Pernyataan Telah  
Direviu



# Perjanjian Kinerja Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara  
Dengan  
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Jarwoko, M.Pd.**

**Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara**



**Jumeri, S.TP.,M.Si.**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.455.030.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.778.672.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.233.702.000</b>

Tanjung Selor, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah**

**Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Utara**



**Jumeri, S.TP., M.Si.**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

# Perjanjian Kinerja Revisi 1



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**  
**Dengan**  
**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Jarwoko, M.Pd.**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**

**Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**



**Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.455.030.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.778.672.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.233.702.000</b>

Tanjung Selor, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**



**Dr. Iwan Syahril, Ph.D.**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

# Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**  
**Dengan**  
**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : Dr. Jarwoko, M.Pd.**

**Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Iwan Syahril**

**Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,**



**Iwan Syahril**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 3.840.156.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 15.823.448.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 19.663.604.000</b>

Tanjung Selor, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar  
dan Pendidikan Menengah,**

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,**



**Iwan Syahril**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KALIMANTAN UTARA  
Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0.98	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 0.98	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 4.01	<p><b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> <b>Kendala / Permasalahan :</b> <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p><b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> <b>Kendala / Permasalahan :</b> <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b></p> <p><b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan yang sudah kami laksanakan di Triwulan ke 3 dalam mendukung ketercapaian IKK 1.1 terkait Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya adalah sbb: Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah, Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK, Pertemuan Pra PMO, Pertemuan periodik PMO, Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan, Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar, Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar, Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Pendidikan ke Pemda, Pendampingan Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru, Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan, Pendampingan Penyusunan Usulan DAK Fisik, Persiapan Rapat Desain Pengembangan atau Penyempurnaan Fitur Aplikasi Dapodik, Sosialisasi Formulir, Prosedur dan Aplikasi Dapodik, Pelaksanaan Uji Petik DAPODIK, serta Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Adapun kendala permasalahan yang dihadapi adalah sbb: 1. Masih rendahnya nilai persentase di beberapa indikator penilaian kualitas data pokok pendidikan. 2. Masih rendahnya partisipasi guru dalam pemanfaatan platform merdeka mengajar. 3. Masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses aktivasi akun belajar id 4. Masih terdapat guru PAUD yang pendidikannya SMA sederajat</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Strategi tindak lanjut 1. Melakukan uji petik, pendampingan, serta evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan data pokok pendidikan kemudian mengadvokasi pemda agar bisa turut bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. 2. Membuat tim khusus yang dibagi perwilayah yang bertugas terus memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam proses pemanfaatan PMM dan proses aktivasi akun belajar 3. Melakukan advokasi ke pemda untuk bisa melakukan pemetaan dan pengadaan guru PAUD dengan kualifikasi pendidika S1</p> <p><b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan pendukung ketercapaian IKK 1.1 ini adalah kegiatan Rapat PMO periodik yang melibatkan satuan pendidikan PAUD yang merupakan sekolah penggerak dan selebih sudah dilaksanakan oleh BP PAUD Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b> Anggaran dan kegiatan telah diselesaikan BP PAUD pada akhir Juni 2022</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> Melakukan perhitungan capaian untuk IKK 1.1 berdasarkan data dari BSKAP pada akhir tahun 2022</p>

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

2	[SK 1.0] Meningkatkan mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 25</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 100</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pada triwulan 1 LPMP Prov. Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKK 1 terkait dengan Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) diantaranya adalah kegiatan: 1. Sosialisasi PSP ke Pemda angkatan 3; 2. Advokasi ke Pemda angkatan 2 dan 3; 3. Penjaringan komitmen daerah angkatan 3; 4. Coaching klinik ke Pemda; 5. Pembentukan Project Management Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota; 6. Bimtek SP untuk tim PMO; 7. Bimbingan Teknis Program SP ke Pemda; 8. Pertemuan periodik PMO; 9. Fasilitasi/Pendampingan Penguatan SDM dan Kordinasi Persiapan Serta Pemantauan Pelaksanaan Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; 10. Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1. Beberapa kegiatan yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka dijadikan kegiatan daring akibat keterbatasan anggaran; 2. Penyesuaian beberapa kegiatan dengan tim pelaksana kegiatan disebabkan beberapa person datu anggota tim masih baru terkait pelaksanaan kegiatan khususnya sekolah penggerak; 3. Terjadi kesulitan penuntasan beberapa data yang dibutuhkan yang penginputannya dilakukan oleh stake holder. Diantaranya adalah terkait dengan aktivasi akun belajar dan pengisian aplikasi e rakor tek.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Adapun strategi yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan tersebut adalah: 1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan walaupun secara daring dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas online untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daring; 2. Melakukan pertemuan rutin dengan Tim, membuat WA grup untuk memudahkan koordinasi, membagikan materi-materi terkait PSP kepada anggota Tim, serta melibatkan seluruh anggota Tim dalam pelaksanaan kegiatan terkait PSP; 3. Melakukan koordinasi langsung kepada satuan pendidikan terkait kendala penyelesaian aktivasi akun belajar; 4. Mengundang stake holder terkait Rakor TEK dalam kegiatan rapat tatap muka serta memberikan pemahaman dan pendampingan dalam penginputan data pada aplikasi E Rakor Tek.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pada triwulan 2, BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian IKK 1, yaitu: 1. Pemantauan Kampus Mengajar dalam Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 2. Persiapan Rapat Kordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Asesmen Nasional 3. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi 4. Pendampingan Implementasi Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi 5. Pendampingan/Persiapan Indikator Mutu Pendidikan Daerah 6. Mendampingi Pemda dalam Perencanaan Sekolah Penggerak 7. Pertemuan untuk Koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK 8. Penguatan Peran UPT Kemendikbud dalam Pendampingan Sekolah Penggerak melalui Forum Pemangku Kepentingan Daerah 9. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data secara daring 10. Advokasi dan Sosialisasi Pedoman Pembelajaran Paradigma baru 11. Pendampingan Pelaksanaan sosialisasi DAK melalui Indikator Mutu Pendidikan 12. Pendampingan Pemda dalam Pelaksanaan seleksi satuan Pendidikan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1. Beberapa kegiatan dijadikan daring karena keterbatasan anggaran 2. Beberapa kegiatan perlu pembelajaran lebih karena merupakan hal yang baru</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Strategi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala yang ada yaitu: 1. Kegiatan yang dilakukan secara daring dilaksanakan dengan persiapan yang matang dan dikemas khusus untuk kegiatan daring sehingga peserta kegiatan bisa tetap mendapatkan manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan 2. Rutin mengadakan diskusi internal maupun menghubungi narasumber eksternal yang mengerti terhadap materi yang kurang dipahami, serta membaca sumber-sumber dari materi terkait.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang sudah kami laksanakan di Triwulan ke 3 dalam mendukung ketercapaian IKK 1.2 terkait Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) adalah sbb: Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan, Pelaksanaan pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan distribusi sekolah menumpang di satuan pendidikan, Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan simulasi Asesmen Nasional, Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional jenjang SMP/SMA/SMK, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan Pendidikan Jenjang SMP/SMA/SMK, Pendampingan Posko AN tingkat daerah, Pendampingan Pemda dalam melaksanakan seleksi satuan pendidikan di daerah, Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK, Pertemuan Pra PMO, Pertemuan periodik PMO, Bimtek platform rapor pendidikan, Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan rencana aksi perbaikan, Bimtek dan penguatan pembelajaran dengan paradigma baru ke Pemda, Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar, Pendampingan Pemanfaatan Platform Sumber Daya Sekolah (SDS), platform rapor pendidikan, dan platform merdeka belajar, Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Pendidikan ke Pemda, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan Pendidikan, Pendampingan Implementasi Pedoman Pembelajaran Paradigma Baru, Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan, Pendampingan Penyusunan Usulan DAK Fisik, Persiapan Rapat Desain Pengembangan atau Penyempurnaan Fitur Aplikasi Dapodik, Sosialisasi Formulir, Prosedur dan Aplikasi Dapodik, Pelaksanaan Uji Petik DAPODIK, serta Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Adapun kendala permasalahan yang dihadapi adalah sbb: 1. Pendampingan ke satuan pendidikan dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan AN belum bisa dilakukan kepada semua satuan pendidikan di kaltara disebabkan masih banyaknya lokasi yang tidak terjangkau oleh internet dan keterbatasan anggaran. 2. Masih rendahnya nilai persentase di beberapa indikator penilaian kualitas data pokok pendidikan. 3. Masih rendahnya partisipasi guru dalam pemanfaatan platform merdeka mengajar. 4. Masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses aktivasi akun belajar id</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Strategi tindak lanjut 1. Terus melakukan advokasi ke pemda khususnya dinas pendidikan agar bisa turut dalam proses pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN khususnya satuan pendidikan yang masih berada pada lokasi-lokasi yang sulit diakses dan tidak memiliki jaringan internet. 2. Melakukan uji petik, pendampingan, serta evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan data pokok pendidikan kemudian mengadvokasi pemda agar bisa turut bersama menyelesaikan permasalahan tersebut. 3. Membuat tim khusus yang dibagi perwilayah yang bertugas terus memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam proses pemanfaatan PMM dan proses aktivasi akun belajar</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang telah dilaksanaka pada TW 4 untuk mendukung ketercapaian IKK 1.2 ini diantaranya: 1. Pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan dalam pelaksanaan gladi bersih Asesmen Nasional Jenjang SD 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan Pendidikan Jenjang SD Pertemuan periodik PMO 3. Penyusunan Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan 4. Diseminasi Bahan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan 5. Pelaksanaan Kemitraan dan Kerjasama berdasarkan Profil Pendidikan 6. Penyusunan Laporan DAK 7. Penyusunan Bahan Update Data Transaksional DAK</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut: 1) Pendampingan ke satuan pendidikan dalam rangka persiapan maupun pelaksanaan AN belum bisa dilakukan kepada semua satuan pendidikan di kaltara disebabkan masih banyaknya lokasi yang tidak terjangkau oleh internet dan keterbatasan anggaran; 2) Masih rendahnya nilai persentase di beberapa indikator penilaian kualitas data pokok pendidikan; 3) Masih rendahnya partisipasi guru dalam pemanfaatan platform merdeka mengajar; dan 4) Masih terdapat berbagai permasalahan dalam proses aktivasi akun belajar.id.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut: 1) Terus melakukan advokasi ke pemda khususnya dinas pendidikan agar bisa turut dalam proses pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN khususnya satuan pendidikan yang masih berada pada lokasi-lokasi yang sulit diakses dan tidak memiliki jaringan internet; 2) Melakukan uji petik, pendampingan, serta evaluasi proses pelaksanaan pengumpulan data pokok pendidikan kemudian mengadvokasi pemda agar bisa turut bersama menyelesaikan permasalahan tersebut; dan 3) Membuat tim khusus yang dibagi perwilayah yang bertugas terus memantau dan mendampingi satuan pendidikan dalam proses pemanfaatan PMM dan proses aktivasi akun belajar. Strategi yang Dilakukan Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen adalah sebagai berikut: 1) Mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan pendampingan persiapan dan pelaksanaan AN khususnya satuan pendidikan yang masih berada pada lokasi-lokasi yang sulit diakses dan tidak memiliki jaringan internet; 2) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas data pokok pendidikan; 3) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui kegiatan daring terkait pemanfaatan PMM dan akun belajar.</p>
---	--	---	---	----	---	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

3	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Predikat	A	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : A	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : BB	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Pada triwulan 1 LPMP Prov. Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKK 2.1 terkait dengan Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah kegiatan: 1. Melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Lembaga di awal tahun; 2. Sosialisasi penyusunan SKP berdasarkan dengan PP 30 2019; 3. Melakukan penyusunan perjanjian kinerja; 4. Menyusun rencana aksi atas perjanjian kinerja; 5. Melaporkan capaian output reguler setiap bulannya; 6. Melaporkan hasil pengukuran kinerja TW 1; 7. Rapat mengisi instrumen ZI WBK.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1. Keterlambatan penyusunan perjanjian kinerja akibat masih disusunnya Renstra Kemendikbud Ristek yang berkonsekuensi berubahnya Renstra turunannya; 2. Belum disusunnya rencana SKP akibat belum terbitnya Renstra kemendikbud Ristek; 3. Keterlambatan pembukaan akses aplikasi Spasikita sehingga proses pengisian capaian reguler di Rapel hingga 3 bulan dengan waktu pengisian yang singkat;</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Adapun strategi yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan tersebut adalah: 1. Atas instruksi tim dari unit utama telah dilakukan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja; 2. Terus berkoordinasi dengan unit utama serta menunggu instruksi terkait penyusunan rencana SKP, apakah melalui aplikasi excel atau sudah ada aplikasi berbasis web; 3. Memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pengisian capaian reguler TW 1 dan pengukuran kinerja TW 1.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Pada triwulan 2 LPMP Prov. Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKK 2.1 terkait dengan Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah kegiatan: 1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Lembaga triwulan 1; 2. Melaporkan capaian output reguler setiap bulannya; 3. Melaporkan hasil pengukuran kinerja TW 2; 4. Rapat mengisi instrumen ZI WBK.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1. Keterlambatan penyusunan perjanjian kinerja akibat masih disusunnya Renstra Kemendikbud Ristek yang berkonsekuensi berubahnya Renstra turunannya; 2. Belum disusunnya rencana SKP akibat belum terbitnya Renstra kemendikbud Ristek; 3. Perubahan nomenklatur dari LPMP menjadi BPMP;</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Adapun strategi yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan tersebut adalah: 1. Atas instruksi tim dari unit utama telah dilakukan pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja; 2. Terus berkoordinasi dengan unit utama serta menunggu instruksi terkait penyusunan rencana SKP, apakah melalui aplikasi excel atau sudah ada aplikasi berbasis web; 3. Berkordinasi dengan pihak terkait mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dari perubahan nomenklatur tersebut, seperti revisi perjanjian kinerja, revisi renstra lembaga</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Kegiatan yang sudah kami laksanakan di Triwulan ke 3 dalam mendukung ketercapaian IKK 1.1 terkait Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah sbb: 1. Melakukan rapat pengukuran kinerja triwulan ke 2 dan melakukan tindak lanjut atas hasil rapat tersebut. 2. Melakukan pemantauan nilai kinerja anggaran baik IKPA maupun EKA 3. Melakukan pelaporan capaian output setiap bulan baik melalui simproka maupun melalui sakti 4. Memantau progres pelaksanaan kegiatan pada program kualitas Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 5. Melengkapi dokumen data dukung evaluasi Sakip</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          Adapun kendala permasalahan yang dihadapi adalah sbb: 1. Masih rendahnya pemahaman sebagian tim sakti 2. Terdapat permasalahan pada penialain deviasi halaman III dipa pada IKPA 3. Masih terdapat beberapa dokumen sakti yang belum terpenuhi dikarenakan berubahnya metode penilaian sakti</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Strategi tindak lanjut: 1. Rutin melakukan diskusi bersama terkait SAKIP, menggali informasi di internet, serta memberikan advice ke atasan agar bisa mengikutkan tim sakti pada pelatihan sakti jika ada. 2. Melakukan koordinasi dengan kanwil DJPB kaltara terkait permasalahan hal III dipa 3. Menyusun kekurangan dokumen tersebut</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 2.1 ini diantaranya: 1. Rapat evaluasi kinerja triwulan yang dilaksanakan secara periodik minimal 2. Melakukan evaluasi mandiri melalui aplikasi spasikita untuk sakti 2022 3. Mengikuti kegiatan penilaian calon satuan kerja ZI WBK yang diadakan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut: 1) Sebagian besar anggota dalam tim belum terlalu memahami terkait proses bisnis implementasi SAKIP. Dari semua anggota tim hanya 1 (satu) orang anggota saja yang memiliki sertifikat pelatihan SAKIP; 2) Keterlambatan penyusunan perjanjian kinerja akibat masih disusunnya Renstra Kemendikbudristek yang berkonsekuensi pada berubahnya Renstra turunannya, serta keterlambatan penyusunan SKP; 3) Terjadinya perubahan nomenklatur lembaga dari LPMP menjadi BPMP sehingga perlu beberapa penyesuaian khususnya terkait tugas dan fungsi lembaga dan juga berakibat bertambahnya beban target IKK karena bergabungnya PAUD ke dalam satker BPMP; dan 4) Masih terdapat beberapa dokumen sakti yang belum terpenuhi dikarenakan berubahnya metode penilaian sakti.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut: 1) Mengupayakan koordinasi dan komunikasi yang solid antara anggota tim, melakukan pengembangan diri secara mandiri dengan memanfaatkan media internet, dan melakukan usaha komunikasi dengan lembaga yang sejenis terkait implementasi SAKIP; 2) Mengikuti rapat penyusunan draft perjanjian kinerja bersama unit eselon 1 (satu) walaupun pelaksanaannya sebelum revisi Renstra Kemendikbud terbit; 3) Melakukan upaya koordinasi dan konsultasi secara intens dengan unit utama terkait penyesuaian tugas dan fungsi lembaga dan juga terkait penambahan beban target IKK karena bergabungnya PAUD ke dalam satker BPMP; 4) Memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk melakukan penyusunan dokumen SAKIP yang diperlukan. Strategi yang Dilakukan Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: 1) Mendorong unit kerja untuk melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM tim Evaluasi Sakip dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan Sakip atau benchmarking/studitiru ke lembaga sejenis yang memiliki capaian Sakip peringkat terbaik; 2) Mendorong tim evaluasi Sakip kedepannya untuk melakukan upaya inisiatif dalam menghadapi berbagai tantangan perubahan yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan; 3) Mendorong unit kerja untuk melakukan penyesuaian pola pelaksanaan kegiatan untuk mendukung ketercapaian target dari IKK terkait peningkatan pembelajaran jenjang PAUD; dan 4) Mendorong tim evaluasi Sakip agar terus bekerja secara optimal melakukan pemenuhan dokumen-dokumen pendukung serta melakukan upaya-upaya yang seharusnya menjadi kewajiban lembaga dalam implementasi Sakip.</p>
---	--	---	----------	---	--	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 2.0] Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	83	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 83</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 94.22</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pada triwulan 1 LPMP Prov. Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKK 2.2 terkait dengan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah kegiatan: 1. Telah dilaksanakannya kegiatan evaluasi IKPA tahun anggaran 2021 di awal tahun; 2. Telah dilakukan penginputan capaian output pada aplikasi sakti maupun pada simproka untuk TW 1; 3. Penyusunan dan penyesuaian halaman III dipa sesuai jadwal yang ditentukan; 4. Pemantauan percepatan realisasi anggaran secara rutin melalui sakti maupun melalui MOLK Kemdikbud; 5. Percepatan penyelesaian SPJ keuangan.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya: 1. Penggunaan aplikasi sakti pada seluruh proses keuangan yang membutuhkan banyak penyesuaian baik mulai dari perencanaan anggarannya sampai pada proses pencairannya; 2. Detail anggaran sampai pada 16 Segmen yang membuat rumitnya proses revisi anggaran dan proses SPJ keuangan; 3. Pagu minus terjadi sampai pada segmen ke 16 sedangkan laporan sisa/realisasi anggaran hanya sampai pada segmen ke 15 (detail akun) yang mempersulit penyesuaian pagu minus di segmen ke 16; 4. Belum menemukan laporan realisasi anggaran SP2D di sakti satker dan MOLK kemdikbud sebagai salah satu data yang digunakan dalam penyesuaian halaman III dipa;</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Adapun strategi yang dilakukan untuk menuntaskan permasalahan tersebut adalah: 1. Melakukan percepatan penyesuaian pola kerja dengan Sakti 2022; 2. Melakukan penyederhanaan detail 16 Segmen agar mempermudah proses revisi dan peng-SPJ-an keuangan; 3. Karena TW 1 laporan SP2D belum ada sehingga harus melakukan pengecekan pagu minus beberapa kali kemudian menyesuikannya lagi di aplikasi sakti; 4. Hal ini sudah ada di TW 2 sehingga untuk TW 2 sudah bisa menyesuaikan.</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Pada triwulan 2 LPMP Prov. Kalimantan Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian IKK 2.2 terkait dengan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara diantaranya adalah kegiatan: 1. Telah dilakukan penginputan capaian output pada aplikasi sakti maupun pada simproka untuk TW 1; 3. Penyusunan dan penyesuaian halaman III dipa sesuai jadwal yang ditentukan; 4. Pemantauan percepatan realisasi anggaran secara rutin melalui sakti maupun melalui MOLK Kemdikbud; 5. Percepatan penyelesaian SPJ keuangan. 6. Percepatan buka blokir anggaran dengan rutin berkoordinasi dengan unit utama, DJA dan DJKN kemenkeu.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Kendala utama BPMP Kaltara di TW 2 adalah terkait belanja modal kami yang masih terblokir. Mengingat pagu anggaran belanja modal kami sebesar kurang lebih 60% dari total pagu, sehingga sebesar apapun realisasi kami di belanja barang dan belanja pegawai tetap saja persentase total realisasi kami tetap rendah. Kendala berikutnya akibat blokir anggaran ini adalah terjadinya deviasi halaman III dipa di Bualn juni karena kami merencanakan realisasi belanja modal sebesar 30% di bulan juni.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Terus melakukan koordinasi dengan unit utama terkait percepatan buka blokir anggaran BPMP Kaltara.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang sudah kami laksanakan di Triwulan ke 3 dalam mendukung ketercapaian IKK 1.1 terkait Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara adalah sbb: 1. Melakukan pemantauan nilai kinerja anggaran baik IKPA maupun EKA 2. Melakukan pelaporan capaian output setiap bulan baik melalui simproka maupun melalui sakti 3. Memantau progres pelaksanaan kegiatan pada program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 4. Melakukan rapat rutin evaluasi pelaksanaan kegiatan TW 2 dan mempersiapkan kegiatan TW 3 5. Melakukan revisi POK untuk kegiatan yang telah dijadwalkan di TW 3 sesuai dengan porsi penganggaran yang telah disepakati untuk 3 bulan kedepan 6. Melakukan penambahan atas kekurangan belanja pegawai 7. Melakukan revisi halaman III dipa tw 3 8. Mengikuti kegiatan evaluasi anggaran yang dilaksanakan oleh unit utama maupun yang dilaksanakan oleh kanwil DJPB kaltara</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Adapun kendala permasalahan yang dihadapi adalah sbb: 1. Terdapat permasalahan pada penialain deviasi halaman III dipa pada IKPA 2. Terdapat sedikit permasalahan pada pengelolaan UP/TUP 3. Terlambatnya proses buka blokir belanja modal yang membebani realisasi anggaran</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Strategi tindak lanjut: 1. Melakukan koordinasi dengan kanwil DJPB kaltara terkait permasalahan hal III dipa 2. Melakukan koordinasi dengan bendahara terkait permasalahan tersebut 3. Melakukan percepatan proses kontrak dan mendorong percepatan pembangunan gedung</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian IKK 2.2 ini diantaranya: 1. Melakukan penginputan capaian output pada aplikasi sakti maupun pada simproka secara priodik 2. Melakukan penyusunan dokumen pengukuran kinerja per triwulan 3. Penyusunan dan penyesuaian halaman III dipa tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan 4. Pemantauan percepatan realisasi anggaran secara rutin melalui sakti maupun melalui MOLK Kemdikbudristek, OM Span maupun pada aplikasi Sakti 5. Melakukan percepatan penyelesaian SPJ keuangan 6. Mengikuti kegiatan evaluasi anggaran yang dilaksanakan oleh unit utama maupun yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB Kaltara 7. Melakukan rapat penyesuaian program kegiatan melalui bedah POK per Triwulan dalam rangka mendorong ketercapaian masing-masing IKK; dan 8. Melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara priodik per Triwulan</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut: 1) Terdapat permasalahan pada penialain deviasi halaman III Dipa pada IKPA yakni terjadinya perbedaan rencana penarikan dana (RPD) halaman III Dipa triwulan III yang diajukan dengan RPD yang menjadi dasar penilaian di OM SPAN sehingga terjadi deviasi yang tinggi; dan 2) Terdapat sedikit permasalahan pada pengelolaan UP/TUP sehingga nilai indikator pengelolaan UP/TUP tidak sempurna; 3) Terlambatnya proses buka blokir belanja modal yang membebani realisasi anggaran. Hal ini disebabkan beberapa kondisi diantaranya: - Perlunya RKBMN perubahan menyesuaikan tahun berjalan; dan - Terjadinya perubahan struktur organisasi di internal DJKN Kementerian Keuangan yang menyebabkan lambatnya proses penetapan penanggung jawab terkait pengesahan RKBMN perubahan.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  Langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, sebagai berikut: 1) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJPB Kalimantan Utara terkait permasalahan perbedaan halaman III Dipa tersebut, selanjutnya mengajukan surat pengajuan banding yang ditujukan kepada Direktur Pelaksana Anggaran DJPB sesuai arahan Kanwil DJPB Kalimantan Utara; 2) Melakukan koordinasi dengan bendahara terkait permasalahan yang terjadi pada pengelolaan UP/TUP yang menyebabkan nilai indikator pengelolaan UP/TUP tidak sempurna; dan 3) Secara intens melakukan koordinasi dengan unit utama, DJA dan DJKN Kementerian Keuangan RI terkait proses pengesahan RKBMN perubahan. Strategi yang Dilakukan Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: 1) Melakukan proses penyusunan rencana penarikan dana (RPD) yang simetris dengan rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan kesepakatan bersama dengan tim keuangan satker terkait RPD yang disusun, dan memantau proses pengajuan revisi ke Kanwil DJPB untuk memastikan pengajuan sudah sesuai dengan realisasi; 2) Mendorong tim keuangan untuk memahami hal-hal yang dapat mengurangi nilai indikator pengelolaan UP/TUP untuk mempermudah melakukan antisipasi; dan 3) Melakukan pengajuan RKBMN perubahan sedini mungkin jika masih terdapat rencana pembangunan gedung negara yang memerlukan RKBMN.</p>
---	--	--	-------	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	42.0000	Lembaga	11	22	45	75	Rp. 3.840.156.000
2	[063] Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP			8	22	40	505	Rp. 3.643.668.000
3	[084] Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan			0	0	3	6	Rp. 196.488.000
4	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0.31	0.55	0.83	1	Rp. 375.000.000
5	[055] Pelayanan Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan			3	6	10	12	Rp. 375.000.000
6	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0.28	0.53	0.86	2	Rp. 5.555.869.000
7	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	11	12	Rp. 2.604.582.000
8	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 2.951.287.000
9	Layanan Prasarana Internal	1.0000	Unit	0.1	0.25	0.8	1	Rp. 9.892.579.000
10	[998] Pembangunan dan Renovasi Gedung Bangunan			0.1	0.25	0.8	1	Rp. 9.892.579.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 19.663.604.000</b>

Tanjung Selor, 17 Januari 2023

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,**



**Dr. Jarwoko, M.Pd.**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjung Selor, 30 Januari 2023  
Ketua Tim Reviu



Qudratullah Polanagau, S.Ag., M.Pd  
197104302006041013



# BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 RT 13 RW 5, Tanjung Selor, Bulungan 77212  
Telepon (0552) 2034391 | Laman <http://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>  
Posel [bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id](mailto:bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id)